

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KOTA MAKASSAR 2020



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA MAKASSAR**

**INDIKATOR KESEJAHTARAAN RAKYAT
KOTA MAKASSAR
TAHUN 2020**

**No Publikasi : 71520.1503
Katalog : 4101004.71
Ukuran Buku : 8,5" x 11"**

**Pembina : Kepala BPS Kota Makassar
Pengarah : Kasi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik**

**Tim Penyusun : Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik
Editor : Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik**

**Gambar Kulit : Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik
Lay Out : Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik**

**Diterbitkan Oleh :
Badan Pusat Statistik Kota Makassar**

**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA MAKASSAR
Jl. Abdurahman Basalamah I Makassar 90231
Telp. 0411 442698
Fax. 0411 442698
e-mail: bps7371@bps.go.id
Homepage: <http://makassarkota.bps.go.id>**

KATA PENGANTAR

Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Makassar Tahun 2020 disusun sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan konsumen data yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat.

Publikasi ini memuat berbagai indikator antara lain, Indikator Kependudukan, Fertilitas dan Keluarga Berencana, Pendidikan, Kesehatan, Ketenagakerjaan, Perumahan dan indikator lainnya. Indikator-indikator tersebut, secara umum dapat menggambarkan tingkat Kesejahteraan Rakyat Kota Makassar.

Kami menyadari bahwa publikasi ini belum sepenuhnya memuaskan semua konsumen data. Saran yang konstruktif tetap diharapkan guna penyempurnaan publikasi berikutnya. Terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi sehingga publikasi ini dapat diterbitkan.

Semoga publikasi ini bermanfaat bagi pengguna data dalam menganalisis dan merencanakan berbagai kegiatan untuk pembangunan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kota Makassar.

Makassar, Desember 2020

Badan Pusat Statistik

Kota Makassar

Kepala,

Ir. Ari Prihandini, M.Si

NIP. 196802221994012001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
ISTILAH TEKHNIS	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	2
1.3. RuangLingkup	2
1.4. Konsep dan Defenisi	3
1.5. Sumber Data	6
1.6. Sistimatika Penulisan	6
BAB II KEPENDUDUKAN	8
2.1. Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk	8
2.2. Pertumbuhan Penduduk	10
2.3. Penyebaran dan Kepadatan Penduduk	11
2.4. Komposisi Penduduk dan Beban Tanggungan	13
2.5. Sex Ratio.....	15
2.6. Status Perkawinan.....	16
BAB. III FERTILITAS DAN KELUARGA BERENCANA	18
3.1. Usia Pernikahan Pertama	18
3.2 Pemakaian Alat/Cara KB	19
BAB IV KESEHATAN	22
4.1. Status Kesehatan Masyarakat	22
4.2. Keluhan Kesehatan.....	23
4.3. Derajat Kesehatan Masyarakat.....	23
4.4. Jaminan Kesehatan	24
4.5. Pemberian Air Susu Ibu (ASI)	25
4.6. Sarana Kesehatan	26
BAB V PENDIDIKAN.....	28
5.1. Sarana Pendidikan.....	28
5.2. Rasio Murid Guru	29

5.3. Rasio Murid Sekolah.....	30
5.4. Angka Partisipasi Sekolah.....	30
5.5. Kemampuan Membaca dan Menulis (Tingkat Buta Huruf).....	32
5.6. Tingkat Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan/Dimiliki	34
BAB VI KETENAGAKERJAAN.....	37
6.1. Penduduk Menurut Jenis Kegiatan.....	38
6.2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Pengangguran Terbuka	38
6.3. Lapangan Pekerjaan dan Jenis Pekerjaan.....	40
6.4. Status Pekerjaan.....	41
6.5. Lama Jam Bekerja	43
BAB VII PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	44
7.1. Status Penguasaan Rumah	44
7.2. Kondisi Fisik Bangunan Tempat Tinggal	45
7.3. Fasilitas Tempat Tinggal	50
BAB VIII INDIKATOR LAINNYA	55
8.1. Persentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran Perkapita.....	55
8.2. Kemiskinan	57
DAFTAR PUSTAKA	61

ISTILAH TEKHNIS

Rata-Rata Pertumbuhan Penduduk

Angka yang menunjukkan tingkat pertumbuhan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan dalam persentase dengan menggunakan rumus eksponensial.

Kepadatan Penduduk

Rata-rata banyaknya penduduk per kilometer persegi

Rasio Dan Jenis Kelamin

Rasio antara banyaknya laki-laki dengan banyaknya perempuan dikalikan 100.

Metode Kontrasepsi

Cara/alat pencegah kehamilan.

Peserta Keluarga Berencana (Akseptor)

Orang yang mengikuti/memakai salah satu metode kontrasepsi.

Angka Kematian Bayi (AKB)

Besarnya probabilita bayi yang meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan per seribu kelahiran).

Angka Harapan Hidup (AHH) Pada Waktu Lahir

Angka perkiraan rata-rata lamanya hidup sejak lahir yang akan dicapai oleh penduduk.

Penduduk Usia Kerja

Penduduk yang berusia 10 tahun keatas.

Bekerja

Melakukan kegiatan/pekerjaan paling sedikit satu jam berturut-turut selama seminggu yang lalu dengan maksud untuk memperoleh atau membantu

memperoleh pendapatan atau keuntungan. Pekerja keluarga yang tidak dibayar termasuk kelompok penduduk yang bekerja.

Angkatan Kerja

Penduduk usia 10 tahun keatas yang bekerja atau mencari pekerjaan.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia 10 tahun keatas.

Penganggur

Mereka yang termasuk dalam angkatan kerja yang tidak bekerja tetapi mencari pekerjaan.

Dependency Ratio/Angka Beban Tanggungan (ABT).

Angka yang menyatakan perbandingan antara penduduk usia tidak produktif (dibawah 15 tahun dan 64 tahun keatas) dengan penduduk usia produktif (antara 15 tahun sampai 64 tahun) dikalikan 100.

Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Ukuran tingkat partisipasi sekolah penduduk menurut batas usia sekolah pada setiap jenjang pendidikan.

Angka Buta Huruf

Ukuran persentase penduduk usia 10 tahun keatas yang tidak bisa membaca dan menulis

Luas Lantai

Luas lantai yang ditempati dan digunakan untuk keperluan sehari-hari.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah terus melakukan pembangunan diberbagai sektor kehidupan. Oleh karena itu diperlukan monitoring untuk melihat capaian pembangunan tersebut. Karena pada dasarnya tujuan pokok dari pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat yang dimaksud tidak hanya menyangkut kemampuan mencukupi kebutuhan yang bersifat materiil (sandang, papan dan pangan), namun juga pemenuhan kebutuhan yang bersifat non materiil (pendidikan, kesehatan, sanitasi lingkungan, dll). Dengan pemenuhan kebutuhan ini diharapkan dapat meningkatkan sumber daya manusia. Disisi lain sumber daya manusia dalam proses pembangunan dapat menjadi potensi dapat pula menjadi beban pembangunan.

Sejalan dengan pergantian masa dan kepemimpinan, apalagi sejak diterapkannya Undang- undang Otonomi Daerah telah mengubah sistem kebijakan negara ini dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Perubahan ini tentunya akan menimbulkan beberapa tantangan dan pertanyaan apakah dengan desentralisasi akan menjamin bahwa kepentingan rakyat banyak akan terpenuhi. Pertanyaan ini akan terjawab bila ada kesepakatan nasional untuk menyamakan persepsi mengenai pembangunan nasional. Dimana kesepakatan itu menjamin bahwa semua rakyat Indonesia sebagai warga negara berhak atas standar pembangunan manusia, seperti baca tulis, mendapat pendidikan yang setinggi-tingginya, hidup sehat, berpenghasilan yang layak, menghuni rumah yang memadai, beribadah dengan tenang sehingga kita bisa hidup sebagai bangsa dengan damai dan nyaman.

Dalam proses pembangunan senantiasa diupayakan peningkatan kemampuan dan kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dan juga menikmati hasil pembangunan, dalam segala aspek kehidupan. Oleh karena itu, pembangunan yang diselenggarakan secara sistematis dan berkesinambungan perlu diukur tingkat keberhasilannya, dan untuk mengukur pelaksanaan pembangunan

secara luas yang meliputi unsur perencanaan, pemantauan dan evaluasi, tentunya diperlukan data statistik. Peranan data sangat penting karena data merupakan bahan baku bagi penyusunan statistik/indikator yang digunakan untuk melihat keadaan, memantau dan mengevaluasi hasil-hasil pembangunan. Disinilah peran serta BPS, khususnya dalam menyediakan data-data statistik yang diperlukan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan.

Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) merupakan salah satu survei yang dilaksanakan oleh Badan pusat Statistik (BPS). Survei ini dilaksanakan tiap triwulan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan data yang berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia. Data yang dihasilkan dari survei ini meliputi informasi tentang demografi, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, keluarga berencana dan kemampuan daya beli masyarakat.

1.2. Tujuan

Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Makassar 2020 diterbitkan sebagai salah satu upaya mengantisipasi kebutuhan data guna pengukuran tingkat pembangunan di Kota Makassar. Publikasi ini berisi kumpulan indikator yang berkaitan dengan berbagai aspek kesejahteraan, yang diharapkan dapat memberikan gambaran perkembangan kesejahteraan masyarakat Kota Makassar dan selanjutnya dapat bermanfaat sebagai bahan informasi dalam perencanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan.

Disamping itu, gambaran tersebut dapat digunakan untuk mengevaluasi hasil pembangunan, yang dapat menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan (rencana pembangunan pada masa yang akan datang).

1.3. RuangLingkup

Aspek kesejahteraan disadari memiliki dimensi yang sangat luas, tidak terbatas hanya menyangkut aspek materi seperti pemenuhan kebutuhan pangan, sandang dan perumahan, melainkan juga aspek non materi seperti pemenuhan kebutuhan pendidikan, kesehatan dan rasa aman. Karenanya guna melihat perkembangan taraf kesejahteraan masyarakat perlu adanya

fokus perhatian pada suatu indikator sebagai petunjuk yang memberikan indikasi tentang perkembangan tersebut. Dengan memperhatikan fokus dan pembatasan masalah, yang dicakup dalam indikator kesejahteraan ini meliputi aspek-aspek kependudukan dan keluarga berencana, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perumahan dan aspek sosial ekonomi lainnya yang berkaitan dengan kesejahteraan.

Indikator menurut jenisnya dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu: indikator masukan, indikator proses dan indikator keluaran/dampak. Dalam publikasi ini ketiga indikator tersebut disajikan dengan ukuran-ukuran seperti jumlah, proporsi, rasio dan angka/tingkat. Penyajian indikator sebagian besar merupakan agregasi pada tingkat Kota Makassar, sementara beberapa indikator yang disajikan pada tingkat kecamatan.

1.4. Konsep dan Defenisi

Untuk menghindari kesalahpahaman atas konsep yang digunakan maka sebelum data tersebut dikumpulkan terlebih dahulu ditentukan batasan terhadap keterangan yang akan dikumpulkan dan batasan tersebut diusahakan baku dan berlaku umum untuk para pemakai data.

Adapun konsep dan defenisi tersebut adalah:

Rumah Tangga Biasa adalah seorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus, dan biasanya makan bersama dari satu dapur. Yang dimaksud dengan makan satu dapur adalah mengurus kebutuhan sehari-hari bersama menjadi satu.

Rumah Tangga Khusus adalah orang-orang yang tinggal di asrama, tangsi, panti asuhan, lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan, dan sekelompok orang mondok dengan makan (indekos) dan berjumlah 10 orang atau lebih. Rumah tangga khusus ini tidak dicakup dalam Susenas.

Kepadatan penduduk adalah rata-rata banyaknya penduduk perkilometer persegi.

Rasio Jenis Kelamin adalah perbandingan antara penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan dikali 100.

Kawin adalah mempunyai istri/suami pada saat pencacahan, baik tinggal bersama maupun terpisah. Dalam hal ini yang dicakup tidak saja mereka yang

kawin sah secara hukum, tetapi juga mereka yang hidup bersama dan oleh masyarakat sekelilingnya dianggap sebagai suami istri.

Cerai Hidup adalah berpisah sebagai suami/istri karena bercerai dan belum kawin lagi. Dalam hal ini termasuk mereka yang mengaku cerai walaupun belum resmi secara hukum. Sebaliknya tidak termasuk mereka yang hanya hidup terpisah tetapi masih berstatus kawin, misalnya suami/istri ke tempat lain karena mencari pekerjaan.

Cerai Mati adalah ditinggal mati oleh suami atau istrinya dan belum kawin lagi.

Metode Kontrasepsi adalah alat/cara pencegah kehamilan.

Sekolah adalah kegiatan bersekolah di sekolah formal mulai dari pendidikan sekolah dasar, menengah, dan perguruan tinggi, termasuk pendidikan yang disamakan.

Tidak atau Belum Pernah Sekolah adalah tidak atau belum pernah sekolah di sekolah formal, misalnya tamat/belum tamat. Taman Kanak-kanak tetapi tidak melanjutkan ke Sekolah Dasar.

Masih Bersekolah adalah sedang mengikuti pendidikan pada jenjang pendidikan dasar, menengah, atau perguruan tinggi.

Tidak Sekolah lagi adalah pernah mengikuti pendidikan dasar, menengah, atau perguruan tinggi tetapi pada saat pencacahan tidak bersekolah lagi.

Melek Huruf adalah penduduk 10 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya.

Angka partisipasi Sekolah adalah ukuran yang menunjukkan tingkat partisipasi sekolah penduduk menurut batasan usia sekolah pada setiap jenjang pendidikan.

Keluhan Kesehatan adalah keadaan seseorang yang merasa terganggu oleh kondisi kesehatan, kejiwaan, atau hal lain. Seseorang yang menderita penyakit kronis dianggap mempunyai keluhan kesehatan walaupun pada waktu survei yang bersangkutan tidak kambuh penyakitnya.

Bekerja adalah Kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan dan lamanya bekerja paling sedikit 1 jam secara terus menerus selama seminggu yang lalu. Pekerja keluarga yang tidak dibayar termasuk kelompok penduduk yang bekerja.

Menganggur adalah penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan. Pengangguran termasuk mereka yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan, telah diterima bekerja tetapi belum bekerja dan yang di PHK tetapi masih berhasrat untuk bekerja.

Penduduk Usia Kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun keatas.

Angkatan Kerja adalah penduduk usia 15 tahun keatas dan selama seminggu yang lalu mempunyai pekerjaan, baik yang bekerja maupun sementara tidak bekerja karena sesuatu sebab seperti menunggu panen, sedang cuti dan sedang menunggu pekerjaan berikutnya. Disamping itu mereka yang tidak mempunyai pekerjaan tetapi sedang mencari pekerjaan.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja adalah Penduduk yang bekerja dan mencari pekerjaan tersebut (angkatan kerja) dibandingkan dengan penduduk usia 15 tahun keatas.

Keterangan :AK = Angkatan Kerja
P₁₅₊= Penduduk usia 15 tahun ketas

Tingkat Pengangguran Terbuka adalah Perbandingan antara jumlah pencari kerja dengan jumlah angkatan kerja.

Keterangan :PT = Tingkat Pengangguran Terbuka
TM = Jumlah Penduduk yang mencari pekerjaan
AK = Jumlah Angkatan Kerja

Angka Beban Tanggungan adalah Angka yang menyatakan perbandingan antara penduduk usia non produktif (usia dibawah 15 tahun dan usia 65 tahun keatas) dengan penduduk usia produktif (antara usia 15 tahun sampai usia 64 tahun) dikali 100.

Penduduk Muda adalah penduduk usia 0-14 tahun dibagi penduduk usia 15-64 tahun dikali 100.

Penduduk Tua adalah penduduk usia 65 tahun keatas dibagi penduduk usia 15-64 tahun dikali 100.

1.5. Sumber Data

Publikasi ini disusun dengan sumber data utama berasal dari hasil survei yang dilaksanakan oleh BPS yakni Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) ditambah beberapa data lain yang terkait. Susenas merupakan survei dengan cakupan data sosial yang paling luas, dan sangat potensial untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan rakyat. Data yang dicakup dalam Susenas antara lain bidang kependudukan, keluarga berencana, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, perumahan dan lingkungan hidup, serta konsumsi rumah tangga.

Untuk itu, data Susenas sangat potensial untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan rakyat, ilustrasi mengenai keadaan berbagai komponen sosial dapat diketahui dengan menyusun data agregat berupa indikator seperti tingkat partisipasi sekolah, pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh penduduk, yang termasuk angkatan kerja dan bukan angkatan kerja, persentase akseptor KB, persentase ibu melahirkan yang ditolong oleh tenaga medis, persentase rumah tangga yang menggunakan sumber air bersih, menikmati listrik dan rata-rata pengeluaran sebulan.

1.6. Sistematika Penulisan

Indikator kesejahteraan rakyat Kota Makassar disusun dalam tujuh bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab pertama, sebagai pendahuluan yang mencakup latar belakang, tujuan, ruang lingkup, konsep dan defenisi, sumber data dan sistematika penulisan.

Bab kedua, tentang hal-hal kependudukan dan Keluarga Berencana, yaitu perkembangan penduduk, sebaran dan kepadatan penduduk, komposisi penduduk, perkawinan dan rumah tangga, fertilitas dan keluarga berencana.

Bab ketiga, memuat tentang Fertilitas dan keluarga berencana yang berisi informasi tentang usia pernikahan pertama dan penggunaan alat kontrasesi Keluarga Berencana.

Bab keempat, merupakan bab pembahasan mengenai kesehatan, yang meliputi status Kesehatan masyarakat, sarana Kesehatan, keluhan Kesehatan dan jaminan Kesehatan.

Bab kelima, dibahas kondisi pendidikan yang mencakup sarana pendidikan, rasio murid-guru, rasio murid sekolah, angka partisipasi sekolah, kemampuan membaca dan menulis dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan.

Bab keenam, digambarkan kondisi ketenagakerjaan yang mencakup penduduk menurut jenis kegiatan, partisipasi angkatan kerja dan pengangguran, lapangan usaha, jenis pekerjaan dan status pekerjaan.

Bab ketujuh, merupakan bab yang membahas tingkat sosial yang berkaitan dengan perumahan dan lingkungan hidup, kondisi fisik bangunan tempat tinggal, utilitas dan fasilitas tempat tinggal.

Bab kedelapan, merupakan bab terakhir yang memberikan gambaran yang menyangkut ekonomi rumahtangga yang mencakup pengeluaran rumahtangga menurut golongan pengeluaran.

<https://makassarkota.bps.go.id>

BAB II

KEPENDUDUKAN

Dalam pelaksanaan pembangunan, penduduk merupakan faktor yang sangat dominan karena tidak saja menjadi sasaran tetapi juga menjadi pelaksana dari pembangunan. Oleh karena itu untuk menunjang keberhasilan pembangunan, perkembangan penduduk perlu diarahkan sehingga mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang menguntungkan pembangunan.

Sementara itu, perluasan analisis khususnya bidang kependudukan akan terus berkembang seiring dengan makin majunya peradaban manusia. Oleh karena itu, tersedianya data kependudukan yang akurat dan tepat waktu sangat dibutuhkan oleh para perencana pembangunan maupun pelaku bisnis.

Pemerintah sangat membutuhkan data jumlah penduduk dan karakteristiknya, misalnya untuk merencanakan penyediaan sarana umum, perumahan, tempat ibadah, fasilitas kesehatan dan tempat rekreasi. Sementara para pelaku bisnis memerlukan data penduduk untuk keperluan rencana produksi, pemasaran dan rekrutmen pekerja/karyawan. Dalam berbagai pihak, bagi lembaga swasta non profit data ini sangat dibutuhkan untuk bahan analisis suatu masalah tertentu.

Salah satu masalah yang perlu diperhatikan dalam proses pembangunan adalah masalah penduduk yang mencakup antara lain jumlah, komposisi dan distribusi penduduk. Oleh sebab itu dalam bab ini akan disajikan tentang jumlah dan pertumbuhan penduduk, penyebaran dan kepadatan penduduk, komposisi penduduk dan beban tanggungan, rasio jenis kelamin dan status perkawinan.

2.1. Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk Kota Makassar tahun 2020 berdasarkan hasil proyeksi penduduk sebesar 1.545.373 jiwa. Jumlah tersebut terdiri dari laki-laki 765.485 jiwa dan perempuan 779.888 jiwa. Dengan demikian, jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari jumlah penduduk laki-laki dengan

perbandingan jenis kelamin (sex ratio) sebesar 98,15. Yang berarti bahwa setiap 100 jiwa penduduk perempuan terdapat 98 jiwa penduduk laki-laki. Penduduk ini tersebar pada 15 kecamatan terdiri dari 153 kelurahan dengan total luas 175,77 km², sehingga kepadatan penduduk di Kota Makassar pada tahun 2020 sekitar 8.693 jiwa per km². Angka ini lebih tinggi dibanding tahun 2019 yang mencapai 8.686 jiwa per km².

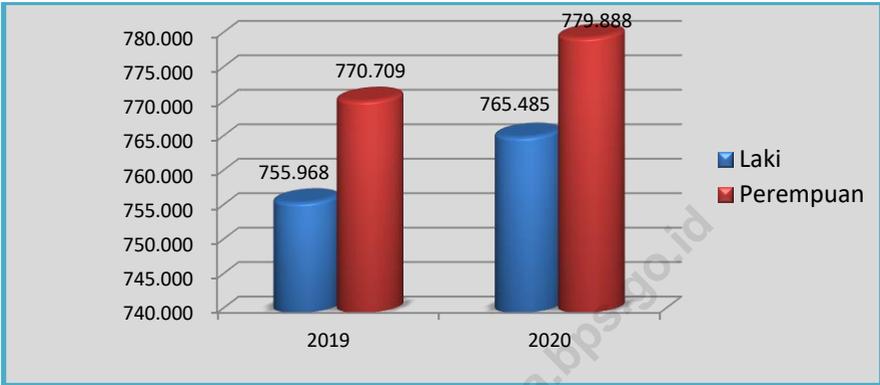
Tabel 2.1
Penduduk Kota Makassar Tahun 2019 dan 2020

Uraian	Tahun	
	2019	2020
(1)	(2)	(3)
Jumlah Penduduk	1.526.677 jiwa	1.545.373 jiwa
- Laki-laki	755.968 jiwa	765.485 jiwa
- Perempuan	770.709 jiwa	779.888 jiwa
Rasio Jenis Kelamin	98,09	98,15
Kepadatan penduduk	8.686 jiwa/km ²	8.693 jiwa/km ²

Sumber : BPS, Proyeksi Penduduk Tahun 2019-2020

Gambar 1

Jumlah Penduduk Kota Makassar Menurut Jenis Kelamin Tahun 2019 dan 2020



2.2. Pertumbuhan Penduduk

Usaha untuk menurunkan tingkat pertumbuhan penduduk selalu menjurus kepada pengkajian bagaimana cara menurunkan tingkat fertilitas, sebab upaya ini merupakan salah satu komponen utama yang berpengaruh terhadap banyaknya penduduk.

Laju pertumbuhan penduduk Kota Makassar untuk periode 2019 dan 2020 sebesar 1,22 persen. Sedangkan laju pertumbuhan penduduk untuk provinsi Sulawesi Selatan, adalah sebesar 0,87 persen, lebih rendah dibandingkan dengan laju pertumbuhan Kota Makassar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat Tabel 2.2.

Tabel 2.2

Pertumbuhan Penduduk Kota Makassar dan Sulawesi Selatan Tahun 2019 dan 2020

wilayah	2019	2020	Pertumbuhan
(1)	(2)	(3)	(4)
Kota Makassar	1.526.677 jiwa	1.545.373 jiwa	1,22
Provinsi Sulawesi Selatan	8.851.240 jiwa	8.928.004 jiwa	0,87

Sumber : Proyeksi Penduduk 2020, BPS

2.3. Penyebaran dan Kepadatan Penduduk

Konsekuensi yang timbul dari permasalahan berkembangnya penduduk adalah bagaimana penyebarannya. Apakah terkonsentrasi pada suatu wilayah atau tersebar normal merata di seluruh wilayah. Ukuran sebaran dan kepadatan penduduk yang ideal sulit untuk ditentukan karena bergantung pada potensi yang dimiliki suatu wilayah serta kemampuan penduduk dalam memanfaatkan potensi yang ada. Umumnya konsentrasi penduduk yang tinggi akan sangat rawan terhadap konflik sosial, selain itu juga menyulitkan pemerintah dalam penyediaan berbagai fasilitas yang dibutuhkan masyarakat. Sebaliknya konsentrasi penduduk yang rendah akan menyebabkan penyediaan fasilitas yang dibutuhkan masyarakat menjadi relatif mudah

Jumlah penduduk Kota Makassar pada tahun 2020 tercatat 1.545.373 jiwa yang tersebar pada 15 kecamatan. Distribusi penduduk menurut kecamatan menunjukkan keadaan sebaran yang tidak merata.

Tabel 2.3 memperlihatkan bahwa perbedaan distribusi penduduk setiap kecamatan dengan persentase luas wilayah mengakibatkan kepadatan penduduk setiap kecamatan juga berbeda-beda. Secara keseluruhan kepadatan penduduk di Kota Makassar yaitu sekitar 8.693,10 jiwa perkilometer. Kepadatan penduduk terendah sebesar 3.675,00 jiwa/km² di Kecamatan Tamalanrea, sedangkan kepadatan tertinggi mencapai 34.011,51 jiwa/km² di Kecamatan Makassar.

Terdapat empat kecamatan yang wilayahnya cukup luas, masing-masing di atas 10 persen dari luas wilayah Kota Makassar. Sementara terdapat enam kecamatan lainnya yang memiliki luas wilayah masing-masing kurang dari 2 persen. Empat wilayah kecamatan terluas di Kota Makassar berturut-turut adalah Biringkanaya 48,22 Km², Tamalanrea 31,84 Km², Manggala 24,14 Km² dan Tamalate 20,21 Km².

Pada Tabel 2.3 terdapat distribusi sebaran penduduk menurut kecamatan. Distribusi penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Biringkanaya sekitar

14,66 persen, Tamalate 13,54 persen, Rappocini 11,12 persen, Manggala 9,91 persen.

Karena pola distribusi penduduk dan luas wilayah antar kecamatan berbeda, maka tingkat kepadatan yang dihitung dengan membandingkan jumlah penduduk terhadap luas wilayah, memiliki pola yang berbeda pula. Pola yang terbentuk menunjukkan bahwa wilayah kota lama yang merupakan pusat niaga dan jasa memiliki konsentrasi penduduk yang tinggi.

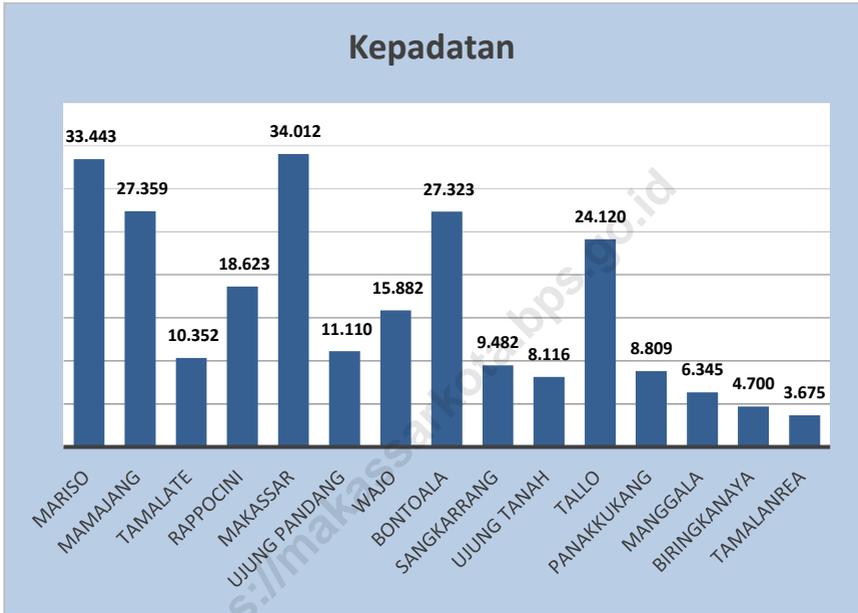
Tabel 2.3
Distribusi dan Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan Tahun 2020

Kecamatan	Luas Wilayah(Km2)	(%)	Penduduk	(%)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/ Km2)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01. Mariso	1,82	1,04	60.866	3,94	33.442,86
02. Mamajang	2,25	1,28	61.557	3,98	27.358,67
03. Tamalate	20,21	11,50	209.214	13,54	10.352,00
04. Rappocini	9,23	5,25	171.893	11,12	18.623,29
05. Makassar	2,52	1,43	85.709	5,65	34.011,51
06. Ujung Pandang	2,63	1,50	29.291	1,89	11.109,89
07. Wajo	1,99	1,13	31.606	2,05	15.882,41
08. Bontoala	2,10	1,19	57.379	3,71	27.323,33
09. Ujung Tanah	4,40	2,50	35.534	2,31	8.116,14
10. Sangkarrang	1,54	0,88	14.602	0,94	9.481,82
11. Tallo	5,83	3,32	140.621	9,10	24.120,24
12. Panakkukang	17,05	9,70	150.189	9,72	8.808,74
13. Manggala	24,14	13,73	153.174	9,91	6.345,24
14. Biringkaya	48,22	27,43	226.621	14,66	4.699,73
15. Tamalanrea	31,84	18,11	117.012	7,57	3.675,00
Jumlah	175,77	100,00	1.545.373	100,00	8.693,10

Sumber : Makassar Dalam Angka 2020, BPS

Untuk itu sangatlah logis apabila pengembangan wilayah pemukiman penduduk dapat diarahkan pada wilayah dengan tingkat kepadatan yang masih rendah, seperti pada kecamatan Biringkanya, Tamalanrea dan Manggala.

Grafik 2
Distribusi Penduduk Kota Makassar per kecamatan Tahun 2020



2.4. Komposisi Penduduk dan Beban Tanggungan

Selain jumlah, pertumbuhan dan kepadatan penduduk, indikator lainnya yang perlu diketahui adalah komposisi penduduk, seperti komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin. Indikator ini menjadi penting sebagai petunjuk perkembangan taraf kesejahteraan karena kejadian demografis maupun karakteristiknya berbeda menurut umur dan jenis kelamin baik untuk kejadian kelahiran, kematian maupun perpindahan penduduk. Komposisi penduduk menurut umur dapat menggambarkan besarnya tingkat kelahiran yakni dengan melihat perubahan persentase penduduk usia muda. Indikator turunan lainnya yang dapat digambarkan dari komposisi kelompok umur adalah angka beban ketergantungan (ABK) yaitu perbandingan antara banyaknya penduduk umur di bawah 15 tahun dan 65 tahun ke atas yang dianggap sebagai usia tidak produktif terhadap penduduk umur 15-64 tahun yang dianggap sebagai usia produktif.

Dengan mengetahui struktur umur penduduk, kita dapat mengukur besarnya dependency ratio (Angka Beban Ketergantungan), yang selanjutnya disebut “beban ketergantungan”. Beban ketergantungan merupakan perbandingan antara jumlah penduduk yang secara ekonomis tidak produktif (usia 0-14 tahun dan 65 tahun) dengan jumlah penduduk yang secara ekonomis dianggap produktif (usia 15-64 tahun). Sehingga semakin kecil porsi penduduk yang berusia non produktif, maka semakin kecil pula angka beban ketergantungan itu dan sebaliknya semakin besar porsi penduduk berusia non produktif, maka semakin besar pula angka beban ketergantungan tersebut.

Dari tabel 2.4 di bawah ini memperlihatkan beban ketergantungan penduduk Kota Makassar pada tahun 2019 sebesar 41,02 dan turun menjadi 40,84 pada tahun 2020. Angka tersebut memberikan gambaran bahwa pada tahun 2020, setiap 100 penduduk produktif di Kota Makassar harus menanggung secara ekonomis sekitar 40 penduduk usia tidak produktif. Turunnya angka beban ketergantungan pada tahun 2020 disebabkan meningkatnya penduduk usia produktif 15-64 tahun dan menurunnya jumlah penduduk berusia 0-4 th.

Tabel 2.4
Angka Beban Ketergantungan Kota Makassar Tahun 2019 – 2020 (%)

Angka Beban Ketergantungan	2019			2020		
	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Penduduk Muda (0-14 thn /15-64 thn)	36,67	34,46	35,55	36,30	34,21	35,24
Penduduk Tua (65+ /15-64 thn)	4,62	6,30	5,47	4,73	6,44	5,60
Total	41,29	40,76	41,02	41,03	40,65	40,84

Sumber : Makassar Dalam Angka 2019 dan 2020, BPS

Jika usia tidak produktif dibedakan antara usia muda (0-14 tahun) dan usia tua (usia 65+), maka angka beban tanggungan dibedakan menjadi angka beban tanggungan penduduk muda dan angka beban tanggungan penduduk tua.

Dalam kurun 2019-2020 angka beban tanggungan penduduk muda mengalami penurunan sebesar 0,31 persen sedangkan angka beban tanggungan penduduk tua meningkat sebesar 0,13 persen. Namun demikian penduduk muda masih dominan sebagai beban tanggungan penduduk usia produktif, karena angka beban tanggungan penduduk tua relatif kecil, yaitu 5,48 pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 sebesar 5,60.

2.5. Sex Ratio

Sex Ratio (ratio jenis kelamin) penduduk Kota Makassar pada tahun 2020 sebesar 98,09, artinya di Kota Makassar terdapat 98 penduduk laki-laki untuk setiap 100 penduduk perempuan. Tabel 2.5 menunjukkan bahwa pada kelompok umur 0-4 tahun dan kelompok umur 5-14 tahun sex rasionya di atas 100, yang berarti jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibanding penduduk perempuan. Sebaliknya pada kelompok umur/usia sedang (15-64) dan kelompok penduduk tua (65+) sex rasionya dibawah 100, yang berarti jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibanding penduduk laki-laki.

Tabel 2.5
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kelompok Umur di Kota Makassar Tahun 2020

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Rasio Jenis Kelamin
(1)	(2)	(3)	(4)
0 - 14	197.014	189.670	103,87
15 - 64	542.763	554.495	97,88
65 +	25.708	35.723	71,96
Total	765.485	779.888	98,15

Pola yang terbentuk dari komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin adalah rasio jenis kelamin penduduk usia dewasa lebih rendah dari penduduk usia muda. Atau dengan kata lain, pada kelompok usia muda jumlah laki-laki lebih banyak dari perempuan. Sedangkan pada kelompok usia dewasa, jumlah laki-lakinya lebih sedikit dibanding jumlah perempuan. Hal ini

disebabkan oleh tingginya tingkat migrasi dan rendahnya tingkat harapan hidup penduduk laki-laki dibanding perempuan.

2.6. Status Perkawinan

Perkawinan merupakan awal terbentuknya suatu keluarga. Keluarga adalah suatu kelompok masyarakat terkecil yang biasanya terdiri dari suami istri dan anak dan ditandai dengan adanya hubungan darah. Namun karena suatu hal, adakalanya keluarga dapat hanya terdiri dari suami-isteri bagi keluarga yang baru terbentuk, ibu dan anak, atau ayah dan anak. Status perkawinan dibedakan menjadi empat kelompok, yakni belum kawin, kawin, cerai hidup dan cerai mati. Perkembangan atau perubahan status perkawinan dapat dijadikan sebagai indikator kesejahteraan, kaitannya dengan tingkat kelahiran dan hubungan sosial. Umumnya, suatu daerah dengan proporsi kawin yang tinggi cenderung memiliki jumlah kelahiran yang tinggi. Kemudian tingginya proporsi penduduk berstatus cerai hidup merupakan gambaran tingginya tingkat perceraian.

Penduduk menurut status perkawinan dapat dibedakan menurut dua kelompok yaitu belum kawin dan pernah kawin. Pernah kawin meliputi mereka yang kawin, cerai hidup dan cerai mati.

Pengertian kawin yang dicakup dalam survei ini adalah penduduk yang terikat dalam perkawinan pada saat pencacahan, baik tinggal bersama maupun terpisah. Dalam hal ini tidak saja mereka yang kawin secara sah/resmi tetapi juga mereka yang hidup bersama dan oleh masyarakat sekitar dianggap sebagai suami istri.

Pada Tabel 2.6 ditampilkan persentase penduduk menurut status perkawinan penduduk Kota Makassar usia 10 tahun ke atas tahun 2019 dan 2020. Nampak bahwa proporsi penduduk berstatus kawin mengalami kenaikan sebesar 4,32 persen selama tahun 2019-2020, yaitu dari 47,62 persen menjadi 51,94 persen. Persentase status perkawinan yang berstatus belum kawin mengalami kenaikan dari 44,13 persen menjadi 45,30 persen.

Berdasarkan jenis kelamin, penduduk laki-laki yang berstatus kawin mengalami peningkatan sebesar 2,22 persen. Demikian pula penduduk perempuan mengalami peningkatan sebesar 6,36 persen. Selama tahun 2019-2020, persentase penduduk cerai di Kota Makassar mengalami penurunan sebesar 5,49 persen. Persentase penurunan terbesar terjadi pada penduduk perempuan sebesar 9,90 persen.

Tabel 2.6
 Persentase Penduduk Usia 15-49 Tahun Menurut Status Perkawinan Kota Makassar 2019-2020

Status Perkawinan	2019			2020		
	L	P	L+ P	L	P	L+ P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Belum Kawin	48,15	40,25	44,13	47,22	43,41	45,30
Kawin	48,18	47,09	47,62	50,40	53,45	51,94
Cerai	3,68	12,66	8,25	2,22	3,14	2,76

Sumber : BPS Kota Makassar, Susenas 2019-2020

BAB. III

FERTILITAS DAN KELUARGA BERENCANA

Salah satu langkah yang dapat diambil untuk menanggulangi masalah tingginya tingkat pertumbuhan penduduk adalah dengan cara menekan tingkat fertilitas, yaitu melalui pembatasan dan penjarangan kelahiran. Proses ini dilaksanakan dengan cara mengajak masyarakat, khususnya pasangan usia subur untuk ikut berperan aktif dalam gerakan keluarga berencana. Gerakan ini bukan sekedar untuk menekan laju pertumbuhan penduduk tetapi lebih dari itu adalah untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk.

Fertilitas dalam demografi didefinisikan sebagai kemampuan seorang wanita untuk menghasilkan anak lahir hidup. Fertilitas (kelahiran) merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk selain mortalitas (kematian) dan migrasi (perpindahan). Fertilitas dapat dipengaruhi oleh keadaan dari wanita itu sendiri yakni secara kodrati wanitalah yang mengalami reproduksi. Keadaan wanita tersebut diantaranya ditinjau dari usia, tingkat pendidikan, usia perkawinan pertama, penggunaan alat kontrasepsi dan lain-lain. BPS membatasi pada wanita pernah kawin berusia 15 hingga 49 tahun dikarenakan usia tersebut merupakan usia subur bagi seorang wanita sehingga kemungkinan seorang wanita dapat melahirkan anak cukup besar dalam rentang usia tersebut.

3.1. Usia Pernikahan Pertama

Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mengendalikan tingkat fertilitas diantaranya pemberian batasan usia pernikahan dan program Keluarga Berencana (KB). Pemberian batasan usia tersebut dimaksudkan agar wanita menunda usia perkawinan mereka sehingga dapat memperpendek masa reproduksinya.

Perempuan yang kawin pada usia yang terlalu muda cenderung beresiko lebih tinggi selama masa kehamilan dan persalinan dibandingkan dengan wanita yang sudah berada pada usia matang (lebih dari 20 tahun). Resiko selama kehamilan dan persalinan akan berdampak pada kesehatan ibu

dan anak. Selain itu, dengan menunda usia kawin diharapkan wanita dapat memiliki kesempatan untuk bersekolah lebih tinggi atau pun bekerja sehingga memiliki bekal yang cukup, baik material maupun spiritual untuk berumah tangga kelak.

Tabel 3.1 menyajikan persentase penduduk perempuan pernah kawin menurut usia perkawinan pertamanya

Tabel 3.1
Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun yang Menikah menurut Usia Perkawinan Pertama

Umur Perkawinan Pertama	Persentase
(1)	(2)
<= 16 tahun	9,15
17-18 tahun	13,33
19-20 tahun	15,09
21 tahun keatas	62,43

Sumber : BPS Kota Makassar, Susenas 2020

Berdasarkan table diatas dapat dilihat bahwa penduduk wanita yang sudah menikah berumur 15-49 tahun, memiliki usia pernikahan pertama kurang atau sama dengan 16 tahun sebesar 9,15 persen, 17-18 tahun sebesar 13,33 persen, 19-20 tahun sebesar 15,09 persen dan 21 tahun keatas sebesar 62,43 persen.

3.2 Pemakaian Alat/Cara KB

Selain melalui penundaan usia perkawinan pertama, partisipasi masyarakat dalam membantu pemerintah menangani masalah kependudukan adalah berupa kesadaran masyarakat untuk mensukseskan Keluarga Berencana. Salah satu tujuan program ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak serta mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera melalui pembatasan dan pengaturan jarak kelahiran.

Program KB merupakan program yang dikeluarkan pemerintahan untuk membatasi jumlah kelahiran. Hal tersebut dimaksudkan agar beban

yang harus ditanggung oleh rumah tangga tidak terlampau besar atau sesuai dengan kemampuan ekonomi yang dimiliki. Jumlah anak yang terbatas juga akan sangat menguntungkan karena ibu dapat memfokuskan perhatian kepada anak-anak mereka yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup anak tersebut. Dalam jangka panjang, diharapkan dari rumah tangga yang terprogram dengan baik tersebut akan menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas untuk kelanjutan pembangunan di masa yang akan datang.

Indikasi makin meningkatnya partisipasi masyarakat pada gerakan keluarga berencana untuk membatasi atau menjarangkan kelahiran salah satunya dengan program KB yang bertujuan selain menurunkan tingkat fertilitas, juga untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rumahtangga.

Tabel 3.2 menyajikan keikutsertaan wanita usia 15-49 tahun yang berstatus kawin menurut penggunaan alat kontrasepsi. Pada tahun 2020, persentase penduduk yang sedang menggunakan alat/cara KB sebesar 39,28 persen. Angka ini lebih rendah dibanding tahun 2018 yang mencapai 45,18.

Tabel 3.2
Jumlah dan Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun yang Berstatus Kawin Menurut Penggunaan Kontrasepsi di Kota Makassar, 2018 dan 2020

Tahun	Pengguna/Memakai alat/Cara KB		
	Sedang Menggunakan	Tidak Menggunakan Lagi	Tidak Pernah Menggunakan
(1)	(2)	(3)	(4)
2018	45,18	16,15	44,48
2020	39,28	16,25	38,67

Sumber : BPS Kota Makassar, Susenas 2018 dan 2020

Tabel 3.3 menyajikan persentase wanita umur 15-49 tahun yang berstatus kawin menurut jenis alat/cara KB yang sedang digunakan. Pemakaian jenis kontrasepsi seperti AKDR/IUD, suntikan, Pil KB dan alat kontrasepsi lainnya terlihat mengalami peningkatan pemakaian alat/cara KB tahun 2020, sedangkan penggunaan jenis kontrasepsi yang mengalami penurunan paling besar adalah kondom yakni turun sebesar 26,94 persen. Namun penggunaan alat kontrasepsi yang paling digemari oleh sebagian besar wanita yang berstatus kawin adalah KB Suntikan mencapai 49,85 persen, diikuti oleh pil sebesar 18,02 persen, dan AKDR/IUD sebesar 15,76 persen.

Banyaknya akseptor yang menggunakan KB suntikan bisa disebabkan karena alat/cara ini relatif lebih praktis dan mudah dilakukan begitu juga dalam hal pemberhentian bisa dilakukan pada saat yang dikehendaki oleh akseptor. Sedangkan untuk penggunaan pil KB, hal ini sejalan dengan pemahaman masyarakat bahwa jenis kontrasepsi Pil KB pada dasarnya memiliki tingkat efektifitas tinggi untuk mencegah kehamilan, akan tetapi dalam pemakaiannya karena faktor kesalahan manusia yang sering terjadi lupa minum pil KB.

Tabel 3.3
 Persentase Wanita Berumur 15-49 tahun yang Kawin Menurut Jenis
 AlatKontrasepsi yang digunakan Di Kota Makassar 2018 dan 2020

Jenis Kontrasepsi	2018 (%)	2020 (%)
(1)	(5)	(3)
MOW/MOP	3,32	1,12
AKDR/IUD	8,45	15,76
Suntikan	36,33	49,85
Susuk	5,78	11,53
Pil	17,20	18,02
Kondom	27,78	0,84
Lainnya	4,44	2,88

Sumber : BPS Kota Makassar ,Susenas 2018-2020

BAB IV KESEHATAN

Pembangunan bidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata, dengan harapan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik.

Upaya perbaikan taraf kesehatan masyarakat dapat ditempuh melalui penyediaan fasilitas kesehatan yang berkesinambungan baik dari segi mutu maupun jumlahnya, seperti rumah sakit, puskesmas, dokter dan tenaga medis lainnya. Pelayanan kesehatan diharapkan semakin baik dengan fasilitas kesehatan yang semakin dekat dengan masyarakat. Sehingga semua lapisan masyarakat mendapatkan akses terhadap pelayanan kesehatan dengan mudah, murah dan merata.

Menurut perencanaan program dan dampaknya, indikator kesehatan terdiri dari indikator upaya perbaikan kesehatan dan status kesehatan, serta indikator penunjang. Indikator kesehatan tersebut yang dapat diturunkan dari data Susenas diantaranya adalah persentase persalinan ditolong tenaga medis, persentase bayi/balita diberi ASI, persentase keluhan kesehatan, dan jumlah hari sakit.

4.1. Status Kesehatan Masyarakat

Status kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh pola hidup masyarakat terutama dalam upaya preventatif. Pola hidup tersebut juga sangat tergantung pada perilaku dan pendapatan masyarakat. Pola hidup mengalami perubahan jika pendapatan cenderung tetap atau mengalami penurunan, di sisi lain pemenuhan kebutuhan semakin sulit dengan kenaikan harga secara terus menerus. Sulitnya memenuhi kebutuhan sehari-hari dapat menyebabkan terjadinya pergeseran pola makan yang secara tidak langsung dapat berpengaruh terhadap kesehatan.

4.2. Keluhan Kesehatan

Keluhan kesehatan adalah keadaan dimana seseorang merasa terganggu oleh kondisi kesehatan, kejiwaan, kecelakaan dan hal lain, termasuk juga mereka yang menderita penyakit kronis dan belum sembuh.

Tabel 4.1 dari data Hasil Susenas 2020 menunjukkan bahwa penduduk yang mengalami keluhan kesehatan sebesar 26,80 persen. Angka ini mengalami kenaikan jika dibandingkan tahun 2019 yang mengalami keluhan kesehatan hanya 13,68 persen. Peningkatan ini bisa jadi karena pada tahun 2020 ini adanya pandemi korona.

Tabel 4.1
Persentase Penduduk Kota Makassar yang Mengalami Keluhan Kesehatan di Kota Makassar 2019 - 2020

Tahun	Laki-laki (%)	Perempuan (%)	Laki-laki + Perempuan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
2019	13,06	14,27	13,68
2020	25,43	28,14	26,80

Sumber : BPS Kota Makassar, Susenas 2019 - 2020

4.3. Derajat Kesehatan Masyarakat

Derajat kesehatan merupakan sesuatu yang ingin dicapai dalam bidang kesehatan. Dengan adanya derajat kesehatan, akan tergambar masalah kesehatan yang sedang dihadapi suatu wilayah. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat, antara lain faktor keturunan/genetis, pelayanan kesehatan, perilaku, dan lingkungan.

Angka Harapan Hidup (AHH) disebut juga lama hidup seseorang/sekelompok orang yang digunakan sebagai acuan dalam perencanaan program-program kesehatan. Selain itu, AHH merupakan suatu alat evaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. AHH yang rendah di suatu wilayah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan dan program

sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori, termasuk program pemberantasan kemiskinan.

Tabel 4.2
Persentase Penduduk yang Berobat jalan Menurut Jenis Kelamin
di Kota Makassar Tahun 2020

	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Ya	32,80	34,71	33,81
Tidak	67,20	65,29	66,19

Sumber : BPS Kota Makassar, Susenas 2020

4.4. Jaminan Kesehatan

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dimulai pada Januari 2014 yang diberlakukan bagi seluruh penduduk Indonesia termasuk Kota Makassar, dapat menjadi solusi atas kendala biaya dalam pengobatan. JKN yang dikembangkan di Indonesia merupakan bagian dari sistem jaminan sosial nasional yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib (mandatory). Hal ini berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2004 tentang SJSN dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak.

Sampai saat ini, pelaksanaan JKN semakin direspon cukup positif oleh masyarakat. Dari data Susenas menunjukkan penduduk Kota Makassar yang menggunakan Jaminan Kesehatan Penerima bantuan iuran (BPJS-PBI) sebanyak 32,01 persen dan Non PBI sebanyak 44,56 persen. Sedangkan yang tidak menggunakan jaminan kesehatan sebanyak 16,63 persen.

Tabel 4.3
 Perse
 ntase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan Menurut
 Jenis Kelamin, Tahun 2020

Tahun	Jenis Kelamin		Total
	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
BPJS Kesehatan PBI	32,10	31,93	32,01
Non PBI	43,86	44,24	44,56
Jamkesda	2,84	2,56	2,70
Asuransi Swasta	2,12	1,98	2,05
Perusahaan Kantor	4,03	3,61	3,81
Tidak Menggunakan	17,06	16,16	16,61

Sumber : BPS Kota Makassar, Susenas 2020

Berdasarkan table 4.3 dapat dilihat bahwa penduduk laki-laki yang memiliki jaminan Kesehatan BPJS PBI sebanyak 32,10 persen dan perempuan sebanyak 31,93 persen. Sedangkan penduduk laki-laki yang tidak menggunakan sebanyak 17,06 persen dan perempuan sebanyak 16,61 persen.

4.5. Pemberian Air Susu Ibu (ASI)

Sekarang ini pemerintah senantiasa mengaktualisasikan dan menyosialisasikan peningkatan pemanfaatan air susu ibu (ASI) bagi balita. Hal ini karena dalam pertumbuhan dan perkembangan balita sangat memerlukan air susu ibu (ASI), karena ASI merupakan zat makanan yang paling ideal untuk pertumbuhan bayi sebab selain bergizi juga mengandung zat pembentuk kekebalan tubuh. Pemberian ASI kepada bayi akan memenuhi kebutuhan gizi dan memberikan kekebalan terhadap beberapa penyakit.

Pemberian ASI merupakan indikator yang dapat menggambarkan tingkat kesadaran ibu terhadap kesehatan anak. Tabel 4.4 memperlihatkan persentase anak usia kurang dari dua tahun yang pernah disusui dan rata-rata lama menyusui di Kota Makassar.

Jika dilihat dari Tabel 4.4 terlihat bahwa anak berusia kurang dari dua tahun (baduta) yang pernah diberi ASI sebanyak 94,02 persen. Ini berarti menunjukkan adanya kesadaran penduduk akan pentingnya ASI bagi bayi. Jika dilihat dari karakteristiknya, 100 persen baduta perempuan pernah diberi ASI sedangkan baduta laki-laki hanya 88,16. Rata-rata lama pemberian ASI untuk baduta di Kota Makassar adalah 8 bulan.

Tabel 4.4

Persentase Anak Berusia Kurang dari 2 tahun (Baduta) yang Pernah Diberi ASI dan Rata-rata Lama Pemberian ASI (Bulan) menurut Karakteristik, 2019

Karakteristik	Persentase Baduta Pernah Diberi ASI	Rata-rata Lama Pemberian ASI
(1)	(2)	(3)
Laki-laki	88,16	8
Perempuan	100,00	8
Total	94,02	8

Sumber : BPS Kota Makassar, Susenas 2019

4.6. Sarana Kesehatan

Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat adalah penyediaan sarana kesehatan yang memadai. Dengan semakin meningkatnya sarana tersebut maka setiap warga masyarakat mempunyai kesempatan yang lebih luas untuk mendapat pelayanan kesehatan yang sebaik-baiknya. Puskesmas adalah satu unit pelayanan fungsional yang fungsi utamanya adalah pelayanan kesehatan tingkat pertama. Wilayah kerjanya meliputi satu kecamatan atau sebagian dari kecamatan atau sebagian dari kecamatan yang biasanya dibangun dengan melihat kepadatan penduduk, luas daerah, keadaan geografi dan infrastruktur lainnya. Dalam melaksanakan tugasnya tidak semua puskesmas dapat menjangkau semua penduduk yang dibebankan dalam wilayahnya, oleh sebab itu harus ditunjang dengan fasilitas layanan kesehatan lainnya. Fasilitas layanan kesehatan lainnya yang dimaksud adalah Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Posyandu. Keberadaan kedua fasilitas ini sangat membantu puskesmas dalam rangka memberikan pelayanan untuk mencapai derajat

kesehatan yang optimal. Selain pengadaan fasilitas kesehatan, juga perlu ditunjang dengan kualitas pelayanan. Untuk itu keberadaan tenaga kesehatan yang berkualitas sangat diperlukan. Kualitas tenaga kesehatan sangat ditentukan oleh spesifikasi pendidikan yang dimiliki yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan yang akan diberikan pada masyarakat.

Tabel 4.5
Banyaknya Sarana Kesehatan menurut Jenisnya di Kota Makassar 2019

Fasilitas Kesehatan	Jumlah
(1)	(3)
Rumah Sakit Umum/Khusus	29
Rumah Sakit Bersalin	21
Puskesmas	44
Pustu	30
Apotek	105

Sumber : BPS, Pendataan Potensi Desa 2019

BAB V

PENDIDIKAN

Sumber daya manusia sangat penting peranannya dalam proses pembangunan. Untuk itu, pembangunan yang dilakukan bermuara pada pembangunan manusia. Salah satu komponen dalam pembangunan manusia adalah peningkatan di bidang pendidikan, karena merupakan suatu sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan manusia. Semakin tinggi tingkat pendidikan suatu masyarakat, semakin baik kualitas sumber dayanya. Program pendidikan mempunyai andil yang sangat besar terhadap kemajuan sosial ekonomi bangsa. Pembangunan pendidikan pada dasarnya dilakukan dalam empat strategi pokok yaitu pemerataan kesempatan, relevansi pendidikan dengan pembangunan, kualitas pendidikan dan efisiensi pengelolaan.

Pemerataan kesempatan pendidikan diupayakan melalui penyediaan sarana dan prasarana belajar seperti gedung sekolah, penambahan tenaga pengajar. Relevansi pendidikan mela l u i k o n s e p “ l i n k a n d m a t c h ” sistem pendidikan dengan kebutuhan lapangan kerja. Pendidikan hendaknya menghasilkan manusia terdidik yang bermutu dan handal sesuai tuntutan zaman. Dan efisiensi pengelolaan pendidikan dimaksudkan supaya pendidikan diselenggarakan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk melihat perkembangan keadaan bidang pendidikan secara umum di Kota Makassar diantaranya adalah kemampuan membaca dan menulis, partisipasi sekolah, pendidikan yang ditamatkan, dan ketersediaan sarana pendidikan.

5.1. Sarana Pendidikan

Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan penting untuk terus diupayakan sebagai konsekuensi dari meningkatnya jumlah penduduk dan diberlakukannya program wajib belajar 9 tahun. Upaya ini ditujukan agar pelayanan pendidikan dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat dan menuju standar yang diharapkan. Ketersediaan sarana pendidikan yang paling

dasar dapat ditunjukkan melalui indikator rasio murid-guru dan rasio murid-sekolah. Meski memiliki kelemahan, yakni indikator bersifat kuantitatif bukan kualitatif, perubahan yang terjadi dalam indikator ini diharapkan dapat memberikan gambaran kemajuan pembangunan sarana pendidikan.

5.2. Rasio Murid Guru

Rasio murid Guru (RMG) merupakan perbandingan jumlah murid dengan jumlah guru pada suatu jenjang pendidikan tertentu. Rasio murid guru menggambarkan rata-rata banyaknya murid yang diajar oleh seorang guru. Kelihatannya ada kecenderungan makin sedikit murid yang ditangani seorang guru semakin baik proses belajar mengajar. Hal ini karena guru dengan mudah memantau murid yang diajar dalam kelas, juga mudah mengukur prestasi belajar setiap siswa. Meskipun demikian, belum ada patokan tentang rasio murid guru yang ideal dalam proses belajar mengajar.

Tabel 5.1
Rasio Murid Guru di Kota Makassar Tahun Ajaran 2019/2020

Jenjang Pendidikan	Jumlah Murid	Jumlah Guru	Rasio Murid Guru
(1)	(2)	(3)	(4)
S D/Sederajat	151.210	8.039	19
S M P/ sederajat	73.372	4.449	16
S MA/Sederajat	45.391	2.858	16

Sumber : Data Dinas Pendidikan dan Kementrian Agama Kota makassar (Makassar Dalam Angka 2020)

Tabel 5.1 menunjukkan nilai Rasio Murid Guru (RMG) pada jenjang pendidikan SD/ sederajat pada tahun ajaran 2019/2020 yaitu 19 yang menunjukkan bahwa setiap guru mengajar sekitar 19 murid. Selanjutnya RMG pada jenjang pendidikan SMP /sederajat sekitar 16 atau terdapat sekitar 16 murid diajar oleh seorang guru. Sementara itu, RMG pada jenjang pendidikan SMA/ sederajat sekitar 16 atau terdapat sekitar 16 murid diajar oleh seorang guru.

5.3. Rasio Murid Sekolah

Rasio murid sekolah (RMS) pada setiap jenjang pendidikan diperoleh dengan membandingkan jumlah murid dengan jumlah sekolah. Rasio murid sekolah menggambarkan rata-rata banyaknya murid pada setiap sekolah dalam setiap jenjang pendidikan. Rasio ini diperlukan untuk mengetahui kepadatan murid pada setiap sekolah yang salah satu kegunaannya adalah untuk melihat layak tidaknya menambah gedung sekolah di suatu wilayah.

Pada tahun ajaran 2019/2020 RMS pada jenjang SD/ sederajat sebanyak 264 murid per sekolah kemudian untuk jenjang SMP/ sederajat sebanyak 270 murid per sekolah dan untuk rasio murid sekolah pada jenjang pendidikan sekolah lanjutan tingkat SMA/ sederajat sebanyak 324 murid/ siswa setiap sekolah.

Besarnya rasio murid sekolah pada setiap jenjang pendidikan sekolah menunjukkan adanya indikasi semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anaknya. Hal ini tentunya sangat beralasan sekali karena hampir seluruh aspek kehidupan memerlukan pendidikan yang memadai. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel 5.2 berikut ini.

Tabel 5.2
Rasio Murid Sekolah di Kota Makassar Tahun Ajaran 2019/2020

Jenjang Pendidikan	Jumlah Murid	Jumlah Sekolah	Rasio Murid Sekolah
(1)	(2)	(3)	(4)
S D/ Sederajat	151.210	573	264
S M P/ sederajat	73.372	272	270
S MA/ Sederajat	45.391	140	324

Sumber : Data Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama Kota Makassar (Makassar Dalam Angka 2020)

5.4. Angka Partisipasi Sekolah

Angka partisipasi sekolah (APS) merupakan proporsi penduduk kelompok usia tertentu yang masih duduk di bangku sekolah. Indikator ini menunjukkan

keadaan proses pendidikan yang diimplementasikan di masyarakat. Angka partisipasi sekolah yang disajikan dalam bab ini menunjukkan perbandingan antara banyaknya murid pada suatu jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk kelompok usia sekolah pada jenjang pendidikan tersebut.

Tabel 5.5
Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Usia 7-12 Tahun, 13-15 Tahun dan 16-18 Tahun Kota Makassar 2020

Jenis Kelamin	Kelompok Umur		
	7-12	13-15	16-18
(1)	(2)	(3)	(4)
Laki-laki	99,42	91,57	79,83
Perempuan	100,00	93,73	67,33
Total	99,70	92,77	73,21

Sumber : BPS Kota Makassar, Susenas 2020

Tabel 5.5 memperlihatkan angka partisipasi sekolah penduduk usia 7-12 tahun di Kota Makassar. Tampak pola partisipasi sekolah penduduk Kota Makassar yang menunjukkan semakin tinggi tingkat pendidikan semakin kecil partisipasi sekolahnya. APS perempuan pada usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun lebih tinggi dibanding APS laki-laki. Sedangkan pada usia 16-18 tahun, APS laki-laki lebih tinggi dari APS perempuan.

Partisipasi sekolah dari penduduk usia 7-12 tahun di tahun 2020 mencapai 99,70 persen, ini dapat diartikan dari 100 penduduk usia 7-12 tahun ada sekitar 99 penduduk yang masih aktif bersekolah. Untuk penduduk usia ini, partisipasi sekolah penduduk perempuan besar dari pada laki-laki yaitu sekitar 99,42 persen laki-laki dan perempuan sekitar 100 persen.

Pada kelompok umur 13-15 tahun, partisipasi sekolahnya lebih rendah dari partisipasi sekolah pada kelompok usia 7-12 tahun. Partisipasi sekolah pada kelompok ini mencapai sekitar 92,77 persen. Jika dilihat menurut jenis kelamin, dimana partisipasi penduduk perempuan lebih tinggi dari laki-laki, yaitu 93,73 persen untuk perempuan dan 91,57 persen untuk laki-laki.

Pada kelompok umur 16-18 tahun, partisipasi sekolahnya juga nampak lebih rendah dibandingkan pada kelompok umur 13-15 tahun. Partisipasi sekolah pada kelompok ini mencapai 73,21 persen. Khusus pada kelompok umur ini, Angka partisipasi laki-laki lebih tinggi disbanding angka partisipasi perempuan. Angka partisipasi penduduk perempuan sebesar 67,33 persen, sedangkan partisipasi penduduk laki-laki sebesar 79,83 persen.

Adanya program pendidikan gratis di Kota Makassar untuk sekolah SD dan SMP telah meningkatkan angka partisipasi sekolah di kota ini. Kemudian jika masih ada penduduk usia sekolah 7-18 tahun yang tidak dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan sekolah, sangat perlu ditelusuri lebih lanjut. Kemudian perlu pembuktian lebih dalam dugaan bahwa penduduk usia sekolah 7-18 tahun di Kota Makassar banyak diantaranya yang putus sekolah karena kondisi sosial ekonomi rumahtangga dan mereka lebih memilih masuk dalam angkatan kerja (bekerja) membantu kegiatan ekonomi orang tua.

5.5. Kemampuan Membaca dan Menulis (Tingkat Buta Huruf)

Kemampuan membaca dan menulis atau tingkat buta huruf terutama untuk penduduk yang berumur 15 tahun ke atas merupakan salah satu indikator untuk melihat keberhasilan program pembangunan di bidang pendidikan. Sebab kalau di suatu wilayah masih cukup banyak penduduk yang buta huruf, jelas merupakan indikator ketertinggalan, sebab seseorang yang buta huruf relatif akan lebih sulit untuk menerima informasi dan pengetahuan baru.

Kemampuan membaca dan menulis merupakan kebutuhan mendasar, tanpa kepandaian tersebut sulit rasanya untuk mengikuti perkembangan informasi

sosial ekonomi global. Ukuran ini merupakan indikator dasar mutu sumber daya manusia yang di ukur dalam aspek pendidikan. Semakin tinggi nilai indikator ini semakin tinggi sumber daya manusia suatu masyarakat.

Melek huruf yang dimaksud adalah jika seseorang yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya. Yang dimaksud huruf lainnya misalnya huruf Arab, Bugis/Makasar, Jawa, Cina dan sebagainya. Sedangkan seseorang yang hanya dapat membaca atau menulis saja belum dianggap sebagai melek huruf.

Tabel 5.6 menunjukkan tingkat kemampuan baca dan tulis penduduk berumur 15 tahun ke atas. Secara umum, selama kurun 2019 – 2020 kemampuan dapat membaca dan menulis penduduk meningkat. Hal itu ditandai dengan meningkatnya persentase penduduk yang dapat membaca dan menulis baik huruf latin maupun huruf lainnya serta menurunnya angka buta huruf. Tahun 2020 sekitar 98,43 persen penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis, atau naik sekitar 0,69 persen dari keadaan tahun 2019 yang mencapai 97,75 persen.

Telaah lebih lanjut menurut jenis kelamin, nampak bahwa kemampuan membaca dan menulis penduduk perempuan lebih rendah dari laki-laki. Penduduk perempuan yang bisa membaca dan menulis sekitar 98,28 persen tahun 2020 dan penduduk laki-laki yang dapat membaca dan menulis sekitar 98,60 persen. Masih adanya penduduk yang buta huruf sebesar 1,57 persen, hal ini seringkali disebabkan angka buta huruf terjadi pada usia lanjut yang sudah enggan untuk belajar membaca dan menulis huruf latin maupun huruf lainnya karena factor usia.

Tabel 5.6
Kemampuan Baca Tulis Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Kota Makassar
2019-2020

Jenis Kelamin	2019		2020	
	Dapat Membaca dan Menulis	Tidak Dapat	Dapat Membaca dan Menulis	Tidak Dapat
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)
Laki-Laki	98,90	1,10	98,60	1,40
Perempuan	96,65	3,35	98,28	1,72
Laki-laki + Perempuan	97,75	2,25	98,43	1,57

Sumber : BPS Kota Makassar, Susenas 2019 – 2020

5.6. Tingkat Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan/Dimiliki

Tingkat pendidikan yang ditamatkan merupakan salah satu ukuran kualitas sumber daya manusia. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan, semakin baik kualitas sumber daya manusianya. Sehingga potensi sumber daya manusia di suatu wilayah dapat dilihat dari jenjang pendidikan yang ditamatkan.

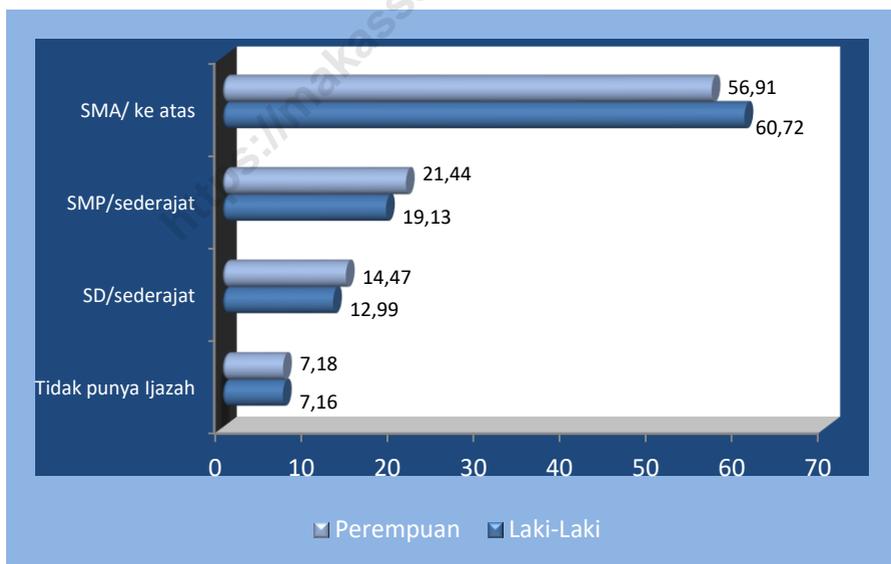
Tabel 5.7 memperlihatkan penduduk Kota Makassar usia 15 tahun ke atas menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan tahun 2020. Bahwa sebagai ibukota provinsi pusat kegiatan ekonomi dengan fasilitas pendidikan yang lengkap, memungkinkan penduduknya untuk memperoleh pendidikan yang tinggi dengan lebih mudah. Pada tahun 2020 sebagian besar penduduk yang berusia 15 tahun ke atas berijazah SMA/ ke atas sebesar 58,76 persen. Sementara penduduk Kota Makassar yang berijazah SD/ sederajat sebesar 13,75 persen, berijazah SMP/ sederajat sebesar 20,32, dan tidak memiliki ijazah sebesar 7,17 persen. Selengkapnya pada Tabel 5.7 dibawah ini.

Tabel 5.7
 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan Yang Ditamatkan di Kota Makassar Tahun 2020

Pendidikan Yang Ditamatkan	2020		
	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak punya Ijazah SD	7,16	7,18	7,17
SD/ sederajat	12,99	14,47	13,75
SMP/ sederajat	19,13	21,44	20,81
SMA/ ke atas	60,72	56,91	58,76

Sumber : BPS Kota Makassar, Susenas 2020

Grafik 4
 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Keatas menurut Pendidikan Yang Ditamatkan Tahun 2020



BAB VI

KETENAGAKERJAAN

Berbicara mengenai pembangunan tentu tercakup didalamnya tentang tenaga kerja. Sektor ketenagakerjaan merupakan salah satu hal penting bagi pembangunan ekonomi, khususnya dalam upaya pemerintah untuk mengurangi penduduk miskin. Masalah yang timbul dalam ketenagakerjaan baik ditingkat nasional maupun regional adalah ketidakseimbangan antara pertumbuhan angkatan kerja dan kesempatan kerja. Pertumbuhan angkatan kerja dari waktu ke waktu masih cukup tinggi, sementara pertumbuhan kesempatan kerja cukup rendah, akibatnya menimbulkan pengangguran, dan arus urbanisasi ke kota besar yang jelas-jelas tidak diinginkan oleh berbagai pihak. Dengan demikian pemerintah perlu strategi pembangunan yang berorientasi pada perluasan/pembukaan kesempatan kerja. Kemudian sejauhmana pemerintah mengambil strategi seperti itu dan menjalankannya seefektif mungkin, telah dianggap sebagai salah satu langkah yang penting artinya bagi keberhasilan pembangunan.

Secara internasional berdasarkan konsep dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, penduduk usia 15-64 tahun dikelompokkan sebagai tenaga kerja (Man Power), sedangkan di Indonesia menggolongkan penduduk usia 15 tahun keatas sebagai tenaga kerja. Batasan ini didasarkan pada kenyataan terdapat banyak penduduk usia 15 tahun keatas yang bekerja.

Melalui konsep Labour Force Approach dari bagian penduduk, tenaga kerja dapat digolongkan mereka yang termasuk angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Yang termasuk angkatan kerja adalah mereka yang bekerja (untuk menghasilkan barang dan jasa) maupun yang belum (sedang mencari pekerjaan). Tenaga kerja yang tidak termasuk angkatan kerja yaitu mencakup mereka yang sedang bersekolah, mengurus rumahtangga, tidak mampu melakukan kegiatan dan lainnya.

Informasi ketenagakerjaan sangat penting terutama untuk perencanaan dan evaluasi pembangunan. Pembangunan ketenagakerjaan diharapkan tidak hanya mengatasi masalah

pengangguran tetapi juga sekaligus meningkatkan taraf kesejahteraan para tenaga kerja dan peningkatan produktifitas secara makro. Dalam ketenagakerjaan dikenal berbagai indikator seperti tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), Tingkat pengangguran (TP), distribusi pekerja menurut sektor usaha.

6.1. Penduduk Menurut Jenis Kegiatan

Tabel 6.1 menyajikan persentase penduduk usia 15 tahun keatas menurut kegiatan utama selama seminggu yang lalu di Kota Makassar tahun 2018 dan 2019. Tabel ini menunjukkan bahwa dari seluruh penduduk angkatan kerja sekitar 51,77 persen penduduk usia 15 tahun keatas tergolong bekerja dan sekitar 6,00 persen yang sedang mencari pekerjaan pada tahun 2019.

Tabel 6.1

Penduduk usia 15 tahun keatas menurut Kegiatan Utama Selama Seminggu Yang Lalu, Di Kota Makassar, 2018 dan 2019

Tahun	Angkatan Kerja		Bukan Angkatan Kerja		
	Bekerja	Mencari Kerja	Sekolah	Mengurus Rumahtangga	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2018	52,23	7,26	14,06	21,52	4,93
2019	51,77	6,00	13,55	23,40	5,28

Sumber : BPS Kota Makassar, Sakernas 2018 dan 2019

6.2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Pengangguran Terbuka

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah suatu ukuran yang dapat menggambarkan partisipasi penduduk usia kerja dalam kegiatan ekonomi. TPAK merupakan perbandingan jumlah angkatan kerja yaitu jumlah penduduk yang bekerja dan mencari pekerjaan terhadap jumlah seluruh penduduk usia kerja (15 tahun keatas).

Tabel 6.2
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka Usia 15 tahun Keatas Di Kota Makassar 2018 dan 2019

Tahun	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
(1)	(2)	(4)
2018	59,49	12,19
2019	57,77	10,39

Sumber : BPS Kota Makassar, Sakernas 2018 dan 2019

Dari tabel 6.2 disajikan indikator ketenagakerjaan pada tahun 2018 dan 2019. Pada rentang waktu tersebut menunjukkan trend penurunan TPAK dan TPT. Pada tahun 2018 TPAK penduduk Kota Makassar sekitar 59,49 yang berarti dari 100 orang yang usia kerja sebanyak 59 orang penduduk yang masuk sebagai angkatan kerja sedangkan sisanya sebagai penduduk bukan angkatan kerja. Selanjutnya, pada tahun 2019 angka TPAK Kota Makassar mengalami penurunan menjadi 57,77.

Sementara itu, TPT kota Makassar pada tahun 2019 mengalami penurunan jika dibandingkan 2018, yaitu dari 12,19 menjadi 10,39. Seperti di negara-negara berkembang, pengangguran masih menjadi persoalan ekonomi di Indonesia. Hal ini diakibatkan oleh tidak terserapnya sebagian angkatan kerja dalam sektor kegiatan ekonomi (lapangan pekerjaan). Dengan kata lain pertumbuhan angkatan kerja lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan lapangan kerja baru. Sehingga sangat diperlukan data mengenai pencari pekerjaan sebagai bahan untuk pertimbangan mengenai masalah ketenagakerjaan. Selanjutnya bagian dari angkatan kerja yang saat ini tidak bekerja tetapi sedang aktif mencari pekerjaan, dapat diartikan pula sebagai tingkat pengangguran terbuka (TPT).

Tingkat pengangguran pada tahun 2015-2016 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2016 TPT laki-laki naik sebesar 4,29 persen dibanding tahun 2015, sementara TPT perempuan justru turun sebesar 4,14 persen. Kondisi perekonomian yang tidak stabil saat ini turut mempengaruhi angka TPAK dan TPT di Kota

Makassar, sehingga masalah pengangguran tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tetapi juga menjadi tanggung jawab kita bersama.

6.3. Lapangan Pekerjaan dan Jenis Pekerjaan

Aktifitas ekonomi suatu wilayah dapat ditunjukkan melalui distribusi penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha.

Tabel 6.3 memperlihatkan bahwa aktifitas ekonomi penduduk Kota Makassar terkonsentrasi pada sektor jasa. Pada tahun 2019, sektor Jasa menyerap 474.567 orang pekerja di kota Makassar. Artinya 80,10 persen penduduk Kota Makassar bekerja di Sektor Jasa. Berdasarkan jenis kelamin, jumlah laki-laki yang bekerja pada sector jasa sebanyak 269.957 pekerja dan perempuan sebanyak 204.610 pekerja.

Selain sector jasa, lapangan pekerjaan yang banyak mempekerjakan penduduk Kota Makassar adalah Sektor manufaktur yaitu sebanyak 111.642 pekerja. Sedangkan sector yang paling sedikit menyerap tenaga kerja adalah sector pertanian. Hal ini karena memang lahan pertanian di Kota Makassar relative kecil.

Tabel 6.3

Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu Yang Lalu menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin Kota Makassar, 2019

Lapangan Pekerjaan Utama	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)
Pertanian	5.806	502	6.308
Manufaktur	86.648	24.994	111.642
Jasa	269.957	204.610	474.567
Jumlah	362.411	230.106	592.517

Sumber : BPS Kota Makassar, Sakernas 2019

Tabel 6.4
Distribusi Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama seminggu
Yang Lalu menurut Jenis Pekerjaan Kota Makassar, 2019

Jenis Pekerjaan	2019		
	L	P	L+P
(1)	(5)	(6)	(7)
Tenaga Profesional	41.449	37.375	78.824
Tenaga Kepemimpinan dan Ketatalaksanaan	14.207	2.838	17.045
Tenaga Tata Usaha dan sejenisnya	44.374	42.482	86.856
Tenaga Usaha Penjualan	75.172	87.871	163.043
Tenaga Usaha Jasa	16.953	27.723	44.676
Tenaga Usaha Pertanian	6.658	502	7.160
Tenaga Produksi, Operator Alat angkutan dan Pekerja Kasar	150.482	30.446	180.928
Lainnya	13.116	869	13.985

Sumber: BPS Kota Makassar, Sakernas 2019

Berdasarkan tabel 6.4 terlihat bahwa sebagian besar tenaga kerja kota Makassar terserap di tenaga produksi, operator alat angkutan, dan pekerja kasar, yaitu sebanyak 180.928 orang. hal ini dikarenakan sektor industri merupakan salah satu penyumbang terbesar untuk produk domestik regional bruto Kota Makassar. Sementara itu, yang paling sedikit merupakan tenaga usaha pertanian, yaitu 7.160 orang.

6.4. Status Pekerjaan

Indikator ketenagakerjaan lainnya menunjukkan tingkat kesejahteraan adalah status pekerjaan penduduk, yakni kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha. Status pekerjaan dibedakan menjadi tujuh kategori, yakni berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap, berusaha dibantu buruh tetap, buruh/karyawan, pekerja bebas pertanian, pekerja bebas non pertanian dan pekerja keluarga. Status pekerjaan ini dapat

dijadikan petunjuk untuk mengetahui status pekerjaan formal dan informal. Indikasi berkembangnya sektor informal dapat dilihat melalui peningkatan jumlah pekerja dengan status berusaha sendiri tanpa bantuan orang lain, berusaha dengan dibantu buruh tidak tetap, pekerja tidak dibayar atau pekerja keluarga dan pekerja bebas. Status pekerjaan ini juga dapat dijadikan petunjuk untuk mengetahui status pekerjaan formal dan informal.

Pada Tabel 6.5 berikut ini, memperlihatkan bahwa selama kurun waktu 2019, pekerja formal di Kota Makassar sebesar 378.858 orang dimana pekerja laki-laki sebesar 63,94 dan pekerja perempuan sebesar 36,06 persen. Sementara pada sektor informal 213.659 hal ini ditunjukkan melalui penduduk yang bekerja dengan status berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap, berusaha dibantu buruh tetap, pekerja bebas di pertanian, pekerja bebas non pertanian dan pekerja keluarga. Dimana pekerja laki-laki sebesar 78,68 persen dan pekerja wanita sebesar 21,72 persen.

Tabel 6.5

Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu Yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Kota Makassar Tahun 2018-2019

Status Pekerjaan Utama	2018			2019		
	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Berusaha sendiri	63.785	56.537	120.322	79.468	48.469	128.117
Berusaha dibantu buruh tidak tetap	10.245	15.738	25.983	15,243	13.583	28.826
Berusaha dibantu buruh tetap	21.811	5.859	27.670	17.572	5.397	22.969
Buruh/karyawan	222.063	133.457	355.520	233.660	145.198	378.858
Pekerja bebas di pertanian	2.494	0	2.494	2	0	2
Pekerja bebas di non pertanian	30.934	9	30.943	11.073	1.226	12.299
Pekerja keluarga	7.676	18.613	26.289	5.393	16.053	21.446
Jumlah	359.008	230.213	589.221	362.411	230.106	592.517

Sumber : BPS Kota Makassar, Hasil Sakernas 2018 dan 2019

6.5. Lama Jam Bekerja

Salah satu ukuran untuk menentukan bagaimana produktifitas pekerja dan ukuran setengah pengangguran dan tenaga kerja penuh adalah jumlah jam bekerja yang digunakan pekerja untuk bekerja dalam seminggu. Batasan yang biasanya dipakai untuk mengukur jam kerja adalah lebih 35 jam/minggu, artinya jika yang bekerja kurang dari jam kerja normal dikatakan sebagai pekerja penganggur/setengah bekerja. Pada tabel 6.6 tampak bahwa 494.994 orang penduduk Kota Makassar yang bekerja selama 35 jam keatas dalam seminggu yakni 317.134 orang laki-laki dan 177.860 orang perempuan pada tahun 2019.

Tabel 6.6
Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Selama Seminggu Yang
Lalu Menurut Jumlah Jam Kerja Seluruhnya di Kota Makassar, 2019

Jumlah Jam Kerja Seluruhnya	2019		
	Laki-laki	Perempuan	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)
0	8.936	5.126	14.062
1 – 14	7.245	15.243	22.488
15 – 34	29.096	31.877	60.973
35 +	317.134	177.860	494.994
Jumlah	362.411	230.106	592.517

Sumber : BPS Kota Makassar, Hasil Sakernas 2019

BAB VII

PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Perumahan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia disamping sandang dan pangan. Rumah selain berfungsi sebagai tempat istirahat atau berlindung dari hujan dan panasnya matahari, juga berfungsi sebagai tempat untuk membina kehidupan rumah tangga dan bersosialisasi antar individu dalam rumah dan mengembangkan diri. Pemerintah telah berupaya untuk mempermudah masyarakat untuk mendapatkan rumah melalui berbagai program diantaranya menyediakan fasilitas kredit kepemilikan rumah (KPR).

Rumah dapat dijadikan sebagai indikator untuk mengukur tingkat sosial masyarakat dan keberhasilan pembangunan di bidang perumahan. Keberadaan rumah yang dimaksud tidak saja menyangkut kuantitas tetapi juga mengenai kualitas rumah. Kondisi fisik bangunan menunjukkan kualitas dan kuantitas tempat tinggal yang dikuasai. Fisik bangunan yang kuat dan terbuat dari bahan yang tidak membahayakan menjamin keamanan penghuni tidak saja dari ancaman tindak kriminal, tetapi juga dari kerentanan bangunan itu sendiri dan kemungkinan terserang penyakit. Fisik bangunan yang kuat ditentukan oleh pemilihan bahan komponen bangunan yaitu lantai, dinding, dan atap. Fasilitas rumah yang tidak memadai dan kondisi lingkungan yang tidak sehat juga akan berpengaruh terhadap kesehatan.

7.1. Status Penguasaan Rumah

Indikator ini memperlihatkan status penguasaan rumah yang dibedakan atas milik sendiri, kontrak, sewa, rumah dinas, bebas sewa dan lainnya. Pada umumnya rumahtangga yang memiliki tempat tinggal sendiri, diperkirakan tingkat kesejahteraannya lebih baik, dibanding mereka yang masih kontrak, sewa atau lainnya. Semakin tinggi persentase rumahtangga yang menempati tempat tinggal sendiri disuatu daerah, akan semakin baik tingkat kesejahteraan daerah tersebut.

Tabel 7.1 memperlihatkan status penguasaan bangunan tempat tinggal oleh rumahtangga di Kota Makassar pada tahun 2018 dan 2019. Selama kurun

waktu 2019-2020, nampak terjadi sedikit penurunan pada penguasaan bangunan tempat tinggal dengan status milik sendiri. Pada tahun 2019, bangunan tempat tinggal yang ditempati oleh pemiliknya sendiri mencapai 58,68 persen, kemudian turun menjadi 58,62 persen di tahun 2020. Sedangkan penduduk yang belum menempati rumah milik sendiri pada berdasarkan hasil susenas 2020 sebesar 41,38 persen.

Penguasaan tempat tinggal bukan milik sendiri oleh rumahtangga dipengaruhi beberapa faktor antara lain; keadaan ekonomi dan sosial masyarakat yaitu rendahnya pendapatan, alasan pendidikan, lokasi tempat kerja dan memilih tinggal bersama keluarga/sanak saudara.

Tabel 7.1
Rumahtangga menurut Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal Kota Makassar, 2019– 2020

Status Penguasaan	2019 (%)	2020 (%)
(1)	(2)	(3)
Milik Sendiri	58,68	58,62
Bukan Milik Sendiri	41,32	41,38

Sumber : BPS Kota Makassar, Susenas 2019– 2020

7.2. Kondisi Fisik Bangunan Tempat Tinggal

Kenyamanan tempat tinggal tidak bisa dipisahkan dari luas lantai dan jenis bahan bangunan, makin luas lantai hunian diimbangi dengan kualitas bahan bangunan yang digunakan makin baik pula kesejahteraan penghuninya. Luas lantai dan jenis bahan bangunannya, merupakan unsur penting dalam menciptakan kondisi kenyamanan dan kesehatan bagi penghuninya. Diperkirakan semakin luas lantai hunian dan semakin baik kualitas bahan bangunan yang digunakan akan menciptakan kondisi, yang semakin nyaman dan sehat bagi penghuninya.

Rata- rata luas lantai per anggota rumahtangga akan memberikan gambaran tentang tingkat kenyamanan suatu rumah bagi penghuninya. Jika rata-rata anggota rumahtangga di Kota Makassar berkisar antara 4 sampai 5 orang, dan

standar normatif luas lantai perkapita seluas 8 m² maka luas lantai hunian yang diharapkan setiap rumahtangga adalah berkisar antara 32 – 40 m².

Kedaaan rumahtangga menurut luas lantai bangunan tempat tinggal selama tahun 2020 menunjukkan bahwa rumahtangga yang menempati rumah dengan luas lantai kurang dari 20 m² sekitar 8,77 persen. Selanjutnya rumah tangga yang menempati rumah dengan luas lantai 20-49 m² sekitar 27,87 persen. Sementara itu, rumahtangga yang menempati rumah dengan luas lantai 50-99 m², yakni mencapai 31,06 persen, sedangkan rumahtangga dengan lantai terluas 100 m² keatas mencapai 32,31 persen.

Dengan melihat kondisi luas lantai bangunan tempat tinggal di kota Makassar, tampaknya masih perlu perhatian dari pihak terkait yang ditujukan terutama bagi rumahtangga yang menempati bangunan luas lantai yang relatif sempit.

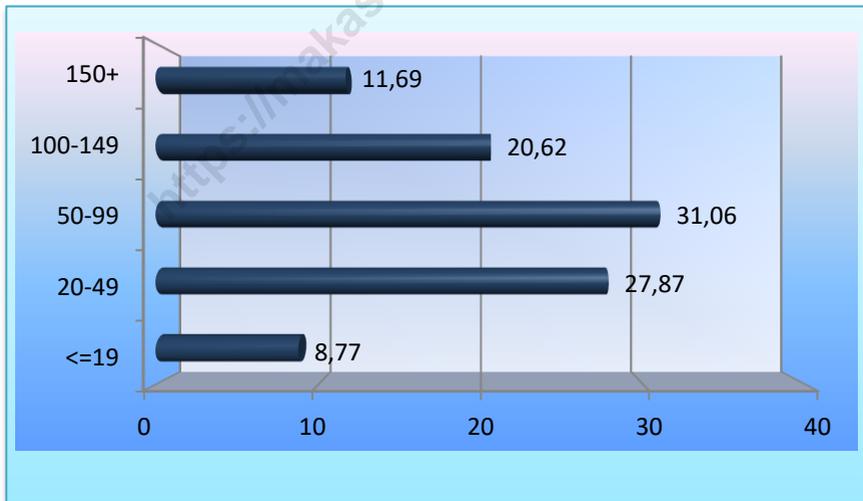
Tabel 7.2 memperlihatkan kondisi fisik bangunan yang ditempati oleh rumahtangga di Kota Makassar. Pada tahun 2020, persentase rumah tangga terbesar menempati rumah dengan luas lantai sebesar 50-99 m² yaitu sebesar 31,06 persen. Secara umum dalam kurun waktu tahun 2020 dibandingkan tahun 2018 kondisi fisik bangunan tempat tinggal di Kota Makassar menunjukkan bahwa lebih dari 50 persen penduduk yang ada di Kota Makassar menempati rumah dengan luas diatas 50 m². Jika diasumsikan satu rumah tangga dihuni oleh 4-5 orang, maka lebih dari 50 persen rumah tangga yang ada di Kota Makassar menghuni rumah yang luas lantainya cukup layak.

Tabel 7.2
 Persentase Rumahtangga menurut Luas Lantai di Kota Makassar Tahun 2018
 dan 2020

Luas Lantai	2018 (%)	2020 (%)
(1)	(2)	(3)
- <=19	8,45	8,77
- 20 – 49	24,99	27,87
- 50 – 99	34,77	31,06
- 100 – 149	17,65	20,62
- 150 +	14,14	11,69

Sumber : BPS Kota Makassar, Susenas 2018 dan 2020

Grafik 5
 Persentase Rumahtangga Menurut Luas Lantai Kota Makassar
 Tahun 2020



Tabel 7.3
 Persentase Rumah tangga Menurut Jenis Dinding Terluas di Kota Makassar
 Tahun 2018 dan 2020

Jenis Dinding	2018 (%)	2020 (%)
(1)	(2)	(3)
- Tembok	78,46	82,31
- Kayu	9,88	9,56
- Bambu/Anyaman bambu	0,57	0,10
- Seng/Lainnya	11,08	8,03

Sumber : BPS Kota Makassar, Susenas 2018 dan 2020

Grafik 6
 Persentase Rumah tangga Menurut Jenis Dinding Terluas Di Kota Makassar
 Tahun 2020



Keadaan rumah tangga menurut dinding terluas tahun 2018 dan 2020 disajikan pada tabel 7.3. Pada tabel ini jenis dinding terluas dibagi dalam empat kelompok, yaitu jenis dinding tembok, kayu, bambu dan lainnya. Tabel 7.3 menunjukkan sebagian besar jenis dinding terluas yang dihuni oleh rumah

tangga sudah berupa tembok, yaitu sebesar 82,31 persen, berupa kayu sebesar 9,56 persen, berupa bambu 0,10 persen dan jenis dinding lainnya sebesar 8,03 persen. Berdasarkan data tersebut dapat dikatakan bahwa sebagian besar dinding terluas di setiap rumahtangga di Kota Makassar sudah merupakan dinding yang permanen karena berupa tembok.

Atap adalah penutup bagian atas suatu bangunan sehingga seseorang yang mendiami terlindung dari terik sinar matahari, hujan dan sebagainya. Untuk jenis bangunan bertingkat, yang dimaksud atap disini adalah bagian yang paling atas dari bangunan tersebut.

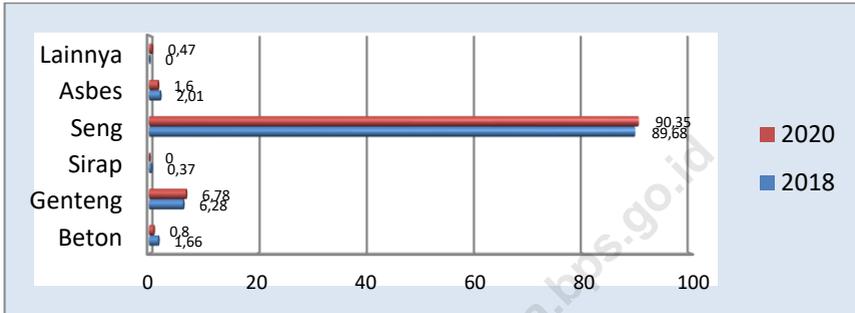
Pada tahun 2020 sebagian besar rumahtangga sudah menempati bangunan tempat tinggal dengan atap seng sebagai atap terluas, yakni mencapai 90,35 persen naik 0,67 persen dari tahun 2018.

Tabel 7.4
 Persentase Rumahtangga Menurut Jenis Atap Terluas di Kota Makassar Tahun 2018 - 2020

Jenis Atap	2018 (%)	2020 (%)
(1)	(2)	(3)
- Beton	1,66	0,80
- Genteng	6,28	6,78
- Sirap	0,37	-
- Seng	89,68	90,35
- Asbes	2,01	1,60
- Lainnya	-	0,47

Sumber : BPS Kota Makassar, Susenas 2018 dan 2020

Grafik 7
Persentase Rumahtangga Menurut Jenis Atap Terluas di Kota Makassar Tahun 2018 dan 2020



Persyaratan lain dari rumah sehat, oleh Depkes adalah lantai rumah harus kering / tidak lembab. Oleh karena itu bahan penutup lantai harus terbuat dari teraso, ubin/tegel, batu bata, atau plur/semen (untuk rumah bukan panggung/tingkat) dan terbuat dari kayu atau bambu (untuk rumah panggung).

7.3. Fasilitas Tempat Tinggal

7.3.1. Sumber Air Minum

Kenyamanan tempat tinggal juga tidak bisa dipisahkan dari kelengkapan, kelayakan dan penggunaan fasilitas tempat tinggal. Air merupakan kebutuhan yang vital, dibutuhkan oleh setiap orang. Air digunakan untuk minum, mandi dan mencuci. Sehat atau bersih tidaknya air yang digunakan akan bergantung pada sumbernya. Penggunaan air bersih dan pemilikan fasilitas air minum dapat dijadikan indikator untuk melihat tingkat kesejahteraan.

Semakin banyak rumahtangga yang memanfaatkan air bersih, menunjukkan semakin baiknya kondisi kesehatan rumahtangga. Demikian halnya dengan semakin banyaknya rumahtangga yang memiliki fasilitas air minum sendiri cenderung semakin baik tingkat kesejahteraannya. Air minum yang dianggap memenuhi syarat kesehatan adalah yang bersumber dari ledeng. Karena sebelum air didistribusikan

ke rumah penduduk terlebih dahulu dilakukan proses penjernihan. Selain itu yang termasuk kategori air bersih adalah air yang bersumber dari pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung. Kebutuhan akan air bersih, terutama untuk bahan baku air yang berkualitas, bila ditinjau dari segi kesehatan dirasakan semakin hari semakin penting. Ini mengingat semakin tingginya permintaan akan air bersih oleh rumahtangga, yang tidak dapat diimbangi penyediaannya oleh alam secara memadai, mengingat daya dukung sumber daya yang terbatas. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat sumber air minum yang dikonsumsi rumahtangga adalah dengan melihat sumber air minum yang digunakan oleh rumahtangga tersebut.

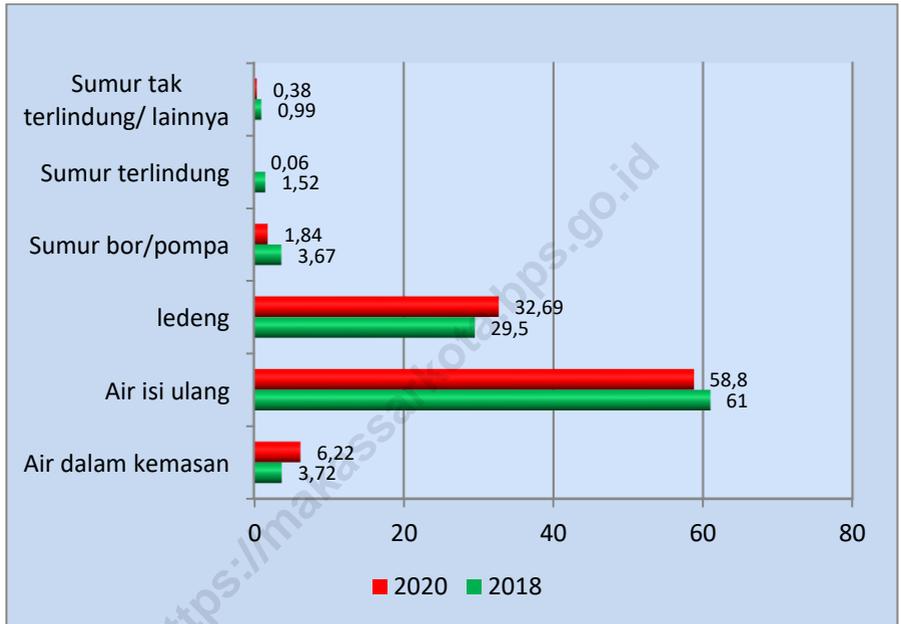
Rumahtangga di Kota Makassar tahun 2020 yang menggunakan air dalam kemasan/air isi ulang dan Air Ledeng (PDAM) sebagai sumber air minum utama menempati urutan pertama dan kedua sebagai sumber air minum yang paling banyak digunakan oleh masyarakat dengan masing-masing persentasenya sebesar 56,80 persen dan 32,69 persen. Sedangkan yang menggunakan air kemasan bermerk sebagai sumber air minum yaitu sekitar 6,22 persen, air bor/pompa sekitar 1,84 persen sumur tak terlindung sekitar 0,38 persen dan sumur terlindung sebesar 0,06 persen.

Tabel 7.5
 Persentase Rumah tangga Menurut Sumber Air Minum di Kota
 Makassar Tahun 2018 dan 2020

Sumber Air Minum	2018	2020
(1)	(3)	(5)
- Air kemasan bermerk	3,72	6,22
- Air isi ulang	61,00	58,80
- Ledeng	29,50	32,69
- Sumur bor/pompa	3,67	1,84
- Sumur terlindung	1,52	0,06
- Sumur tak terlindung/Lainnya	0,99	0,38

Sumber : BPS Kota Makassar, Susenas 2018 dan 2020

Grafik 8
 Persentase Rumah tangga Menurut Sumber Air Minum di Kota
 Makassar Tahun 2018 dan 2020



7.3.2. Fasilitas Buang Air Besar

Fasilitas buang air besar merupakan salah satu fasilitas tempat tinggal yang sangat penting, karena berhubungan erat dengan sanitasi lingkungan tempat tinggal, terutama berupa penggunaan kloset dan tempat penampungan akhir kotoran/tinja. Fasilitas buang air besar yang dianggap memenuhi syarat kesehatan adalah kakus yang menggunakan kloset leher angsa atau plengsengan dengan penampungan akhir berupa tangki septik. Tangki septik dapat mencegah limbah untuk tidak mencemari lingkungan terutama air sumur yang dibuat/berada di sekitar tempat tersebut.

Dari tabel 7.6 dapat dilihat bahwa persentase rumahtangga dalam menggunakan tempat buang air besar dengan fasilitas tempat buang air

besar digunakan oleh rumahtangga itu sendiri tahun 2018 sebesar 83,66 persen dan 84,56 persen tahun 2020 sedangkan untuk fasilitas tempat buang air besar yang lainnya (Bersama, MCK umum dan tidak memiliki fasilitas) pada tahun 2018 sebesar 16,34 persen dan 15,43 persen tahun 2020. Sedangkan tempat pembuangan akhir tinja rumah tangga di Kota Makassar pada tahun 2020 sebagian besar menggunakan Tangki/IPAL/SPAL yakni sebesar 95,27 persen.

Tabel 7.6

Persentase Rumah Tangga Menurut Fasilitas Tempat Buang Air dan Tempat Pembuangan Akhir Tinja Di Kota Makassar Tahun 2018 dan 2020

Fasilitas	2018 (%)	2020 (%)
(1)	(2)	(3)
Fasilitas Tempat Besar		
- Sendiri	83,66	84,58
- Lainnya *)	16,34	15,42
Tempat Pembuangan Akhir Tinja		
- Tangki/IPAL/SPAL	99,06	95,27
- Lainnya	0,94	4,73

*) Lainnya : Termasuk fasilitas bersama, MCK Umum dan tidak memiliki fasilitas

Sumber : BPS Kota Makassar, Susenas 2018 dan 2020

7.3.3. Fasilitas Penerangan

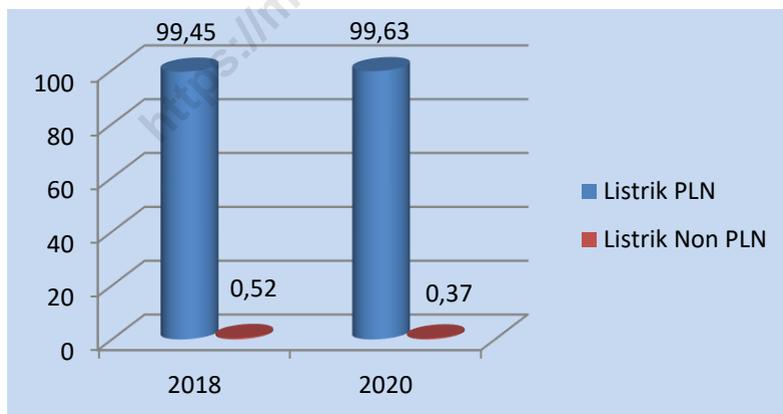
Fasilitas listrik juga banyak memberikan efisiensi dan produktivitas pada pemakaian sebagai sumber penerangan. Pada tabel 7.7 untuk sumber penerangan sebagian besar rumahtangga sudah menggunakan listrik tanpa melihat apakah bersumber dari PLN maupun non PLN. Untuk tahun 2020 yaitu sekitar 93,39 persen sudah menggunakan sumber penerangan listrik dari PLN dan 6,25 [ersen menggunakan listrik yang bukan PLN.

Tabel 7.7
 Persentase Rumah Tangga Menurut Fasilitas Penerangan Di Kota Makassar
 Tahun 2018 dan 2020

Fasilitas Penerangan	2018 (%)	2020 (%)
(1)	(2)	(3)
- Listrik PLN	94,71	93,38
- Listrik PLN non meteran	4,78	6,25
- Listrik non PLN	0,52	0,20
- Pelita/Lainnya	-	0,17

Sumber : BPS Kota Makassar, Susenas 2018 dan 2020

Grafik 9
 Persentase Rumah tangga Menurut Sumber Penerangan di Kota
 Makassar Tahun 2018 dan 2020



BAB VIII
INDIKATOR LAINNYA

Pengeluaran rumahtangga dapat dibedakan menurut pengeluaran makanan dan bukan makanan, dimana menggambarkan bagaimana penduduk Kota Makassar mengalokasikan kebutuhan rumahtangganya. Walaupun harga antar daerah berbeda, nilai pengeluaran rumahtangga masih dapat menunjukkan perbedaan tingkat kesejahteraan penduduk, khususnya dilihat dari segi ekonomi.

8.1. Persentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran Perkapita

Tabel 8.1 menggambarkan rata-rata pengeluaran penduduk menurut golongan pengeluaran per kapita per bulan. Tampak pada tahun 2019, total rata-rata pengeluaran penduduk perkapita pada golongan pengeluaran Rp. 150.000-199.999 sebesar Rp 197,693 dengan rincian pengeluaran makanan sebesar Rp 85,457,- dan non makanan sebesar Rp 112.236.

Tabel 8.1
Rata-Rata Pengeluaran Per kapita Sebulan (Rupiah) Menurut Golongan
Pengeluaran di Kota Makassar Tahun 2019

No.	Golongan pengeluaran	Makanan	Non Makanan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	< 150.000	-	-	-
2.	150.000 – 199.999	85.457	112.236	197.693
3.	200.000 – 299.999	145.399	117.762	263,101
4.	300.000 – 499.999	233.210	173.239	406.449
5.	500.000 – 749.999	337.800	281.699	619.458
6.	750.000 – 999.999	475.879	393.377	869.256
7.	1.000.000– 1.499.999	644.283	604.494	1.248.776
8.	1.500.000 +	1.010.881	1.624.448	2.635.329
	Rata Rata	655.712	857.383	1.513.094

Sumber : BPS Kota Makassar, Hasil Susenas 2019

Persentase rata-rata pengeluaran perkapita sebulan untuk makanan dan non makanan di Kota Makassar dapat dilihat pada tabel 8.2. Persentase rata-rata pengeluaran makanan pada tahun 2019 sebesar 43,74 persen dan non makanan sebesar 56,66 persen.

Tabel 8.2

Persentase Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan untuk Makanan dan Bukan Makanan Kota Makassar Tahun 2017-2019

Tahun	Persentase	
	Makanan	Bukan Makanan
(1)	(2)	(3)
2017	39,93	60,07
2018	43,74	56,26
2019	43,34	56,66

Sumber : BPS Kota Makassar, Hasil Susenas 2017-2019

Secara umum pergerakan yang terjadi dari tahun 2017 ke tahun 2018 terlihat bahwa konsumsi bukan makanan mendominasi struktur konsumsi penduduk Kota Makassar. Bila melihat komposisi pola konsumsi masyarakat Kota Makassar tahun 2017 – 2018 terlihat bahwa pengeluaran konsumsi untuk makanan tahun 2017 ke tahun 2018 bergerak dari 39,93 persen menjadi 43,74 persen dan konsumsi non makanan bergerak dari 60,07 persen menjadi 56,26 persen. Sedangkan pada tahun 2019. Ada sedikit penurunan pada persentase konsumsi makanan di banding tahun 2018.

Jika melihat besarnya pengeluaran pe

rkapita untuk konsumsi makanan dibandingkan non makanan maka dapat dilihat bahwa pengeluaran perkapita penduduk kota Makassar utuk non makanan lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran konsumsi makanan. Hal ini juga memberikaan gambaran bahwa kondisi kesejahteraan masyarakat relative lebih baik.

8.2. Kemiskinan

Miskin adalah kondisi kehidupan yang serba kekurangan yang dialami seseorang/rumahtangga sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan yang layak bagi kehidupan. Penduduk atau rumahtangga miskin yang mengalami masalah/hambatan untuk dapat hidup secara layak, secara konseptual disebut sebagai fakir miskin dan digolongkan sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Sesuai dengan definisi yang disepakati fakir miskin adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena sebab-sebab tertentu tidak dapat melaksanakan fungsinya untuk memenuhi kebutuhan minimum, baik berupa kebutuhan jasmani, rohani maupun sosial.

BPS mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar tertentu dari kebutuhan dasar, baik makanan maupun bukan makanan. Standar ini disebut garis kemiskinan yaitu nilai pengeluaran konsumsi kebutuhan dasar makanan setara dengan 2100 kalori energi perkapita perhari, ditambah nilai pengeluaran untuk kebutuhan dasar bukan makanan yang paling pokok.

Penduduk dengan pengeluaran perkapita di bawah garis kemiskinan diklasifikasikan sebagai penduduk miskin demikian pula penghitungan untuk penduduk fakir miskin. Pemanfaatan data kemiskinan yang dihasilkan oleh BPS biasanya digunakan Pemerintah untuk perencanaan makro, khususnya untuk menentukan alokasi dan besaran dana untuk membantu penduduk miskin dan fakir miskin, baik untuk tingkat nasional maupun tingkat wilayah.

Kemiskinan secara asal penyebabnya terbagi menjadi 2 macam. Pertama adalah kemiskinan kultural, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh adanya faktor-faktor adat atau budaya suatu daerah tertentu yang membelenggu seseorang atau sekelompok masyarakat tertentu sehingga membuatnya tetap melekat dengan kemiskinan. Kemiskinan seperti ini bisa dihilangkan atau sedikitnya bisa dikurangi dengan mengabaikan faktor-faktor yang menghalanginya untuk melakukan perubahan ke arah tingkat kehidupan yang lebih baik. Kedua adalah kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan yang terjadi

sebagai akibat ketidakberdayaan seseorang atau sekelompok masyarakat tertentu terhadap sistem atau tatanan sosial yang tidak adil, karenanya mereka berada pada posisi tawar yang sangat lemah dan tidak memiliki akses untuk mengembangkan dan membebaskan diri mereka sendiri dari perangkap kemiskinan atau dengan perkataan lain masyarakat menjadi miskin karena mereka miskin

Kemiskinan secara konseptual dibedakan menurut kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut, dimana perbedaannya terletak pada standar penilaiannya. Standar penilaian kemiskinan relatif merupakan standar kehidupan yang ditentukan dan ditetapkan secara subyektif oleh masyarakat setempat dan bersifat lokal serta mereka yang berada dibawah standar penilaian tersebut dikategorikan sebagai miskin secara relatif. Sedangkan standar penilaian kemiskinan secara absolut merupakan standar kehidupan minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang diperlukan, baik makanan maupun non makanan. Standar kehidupan minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar ini disebut sebagai garis kemiskinan. BPS mendefinisikan garis kemiskinan sebagai nilai rupiah yang harus dikeluarkan seseorang dalam sebulan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar asupan kalori sebesar 2.100 kkal/hari per kapita (garis kemiskinan makanan) ditambah kebutuhan minimum non makanan yang merupakan kebutuhan dasar seseorang, yaitu papan, sandang, sekolah dan transportasi serta kebutuhan individu dan rumah tangga dasar lainnya (garis kemiskinan non makanan).

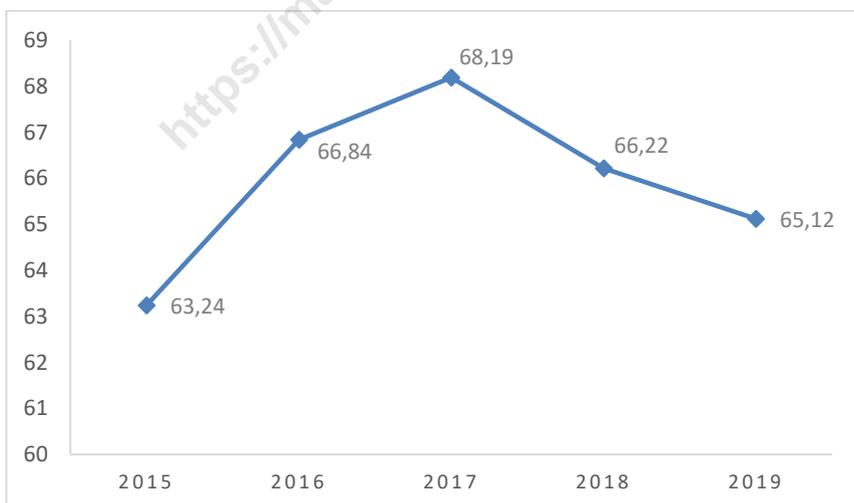
Garis kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Tabel 8.2
 Jumlah Penduduk Miskin, Persentase, dan Garis Kemiskinan di Kota
 Makassar Tahun 2015 – 2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jumlah Pend.Miskin (000)	63,24	66,84	68,19	66,22	65,12
Persentase pend.Miskin (%)	4,36	4,56	4,59	4,41	4,28
Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	321.094	347.723	366.430	386.545	418.831

Sumber : BPS Kota Makassar, Hasil Susenas 2015-2019

Grafik 10
 Jumlah Penduduk Miskin Kota Makassar Tahun 2015-2019 (Ribu Jiwa)



Jumlah penduduk miskin pada tahun 2019 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2018. Secara absolut jumlah penduduk miskin turun pada periode 2019 sebesar 1100 ribu jiwa, yaitu 66,22 ribu jiwa pada tahun 2018 menjadi 65,12 ribu jiwa pada tahun 2019.

Perubahan tingkat kemiskinan selama setahun terakhir ini dapat dilihat melalui analisis tren tingkat kemiskinan antara kondisi tahun 2015 dan tahun 2019. Analisis ini mencakup jumlah penduduk miskin, persentase penduduk miskin dan mencakup garis kemiskinan, kemiskinan.

8.2.1. Garis Kemiskinan

Garis kemiskinan menurut Kabupaten/Kota, khusus di Kota Makassar pada tahun 2015 – 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp.97.737,- perkapita per bulan, yaitu dari Rp. 321.094,- pada tahun 2015 menjadi Rp.418.831 tahun 2019,-.

8.2.2. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin

Jumlah penduduk miskin di Kota Makassar tahun 2019 sebesar 65,12 ribu jiwa, angka ini mengalami penurunan sebanyak 1,1 ribu jiwa dari tahun 2018, dimana jumlah penduduk miskin pada tahun 2018 sebesar 66,22 ribu jiwa. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2019 yang mencapai angka 8.772 ribu jiwa, kota Makassar merupakan Kabupaten/Kota yang menduduki peringkat kedua jumlah terbanyak penduduk miskinnya setelah kabupaten Bone.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS, Provinsi Sulawesi Selatan, (2017), Statistik Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2017, Sul Sel
- BPS, Provinsi Sulawesi Selatan, (2019), Statistik Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019, Sul Sel
- BPS, Provinsi Sulawesi Selatan, (2018), Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018, Sul Sel
- BPS, Provinsi Sulawesi Selatan, (2018), Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018, Sul Sel
- BPS, Provinsi Sulawesi Selatan, (2016), Hasil Sensus Penduduk 2010 Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2010, Sul-Sel
- BPS, Provinsi Sulawesi Selatan, (2019), Indikator Kemiskinan Kab/Kota Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019, Sul Sel
- BPS, Provinsi Sulawesi Selatan, (2016), Percepatan penyediaan Data Statistik dalam rangka Alokasi Dana Perimbangan Daerah, Penduduk Pertengahan tahun 2010-2016 Provinsi Sulawesi Selatan, 2016
- BPS, Kota Makassar, Makassar Dalam Angka Kota Makassar, 2018-2020, Makassar
- BPS, Kota Makassar, Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Makassar, 2020, Makassar